



WALI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 500.12.6.1/270/DN-11.AI TAHUN 2024  
TENTANG

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang



Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);

10. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 Nomor 21);
11. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 Nomor 23);
12. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 Nomor 24);
13. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 Nomor 28);
14. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 52);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 114);
16. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang  
(Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :





- KESATU : Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
- KEDUA : Arsitektur dan Peta Rencana SPBE digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
- KETIGA : Sasaran penggunaan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE adalah seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sebagai acuan dalam proses perencanaan, pengembangan, tata kelola, pengawasan, monitoring evaluasi dan audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Singkawang.
- KEEMPAT : Arsitektur dan Peta Rencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).
- KELIMA : Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Reviu Arsitektur dan Peta Rencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilakukan berdasarkan :
- a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. perubahan Rencana Pembangunan Daerah; atau
  - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah

KETUJUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 11 JULI 2024  
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,



SUMASTRO

Jabatan	Paraf	Tanggal
Pj. Sekretaris Daerah		
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
Kepala Bagian Hukum		
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika		28/5. 2024



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 500.12.6.1/ 270/DN-11.AI TAHUN  
2024 TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA  
RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH  
KOTA SINGKAWANG  
TANGGAL

### BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Transformasi digital merupakan kebutuhan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Pemerintah Kota Singkawang berkomitmen untuk mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi landasan utama bagi penyelenggaraan SPBE di Indonesia. Peraturan ini menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam konteks Pemerintah Kota Singkawang, penerapan SPBE diharapkan dapat:

1. Meningkatkan Efisiensi: Mengurangi birokrasi dan mempercepat proses administrasi melalui otomatisasi dan digitalisasi proses bisnis.
2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan setiap proses dan layanan pemerintah dapat diakses dan diaudit oleh masyarakat.
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat.
4. Mendukung Pengambilan Keputusan: Menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam mengimplementasikan SPBE. Peraturan ini mengatur tentang prinsip-prinsip dasar, strategi, dan tata kelola

SPBE yang harus diterapkan oleh setiap instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Transformasi ini tidak hanya memerlukan perubahan teknologi tetapi juga perubahan budaya kerja dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, dokumen ini disusun untuk menguraikan kerangka kerja arsitektur SPBE yang akan diterapkan di Kota Singkawang, dengan harapan dapat menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan dan mengembangkan SPBE secara berkelanjutan.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan dokumen ini meliputi berbagai peraturan yang menjadi landasan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Singkawang. Adapun dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Komunikasi Dan Informatika.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
14. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
16. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
17. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
18. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas.
19. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
20. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
21. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
22. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang 2023-2026.
23. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 500.12.1/278/KOMINFO.APTIKA Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

### **1.3. Tujuan dan Sasaran Kota Singkawang**

Tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Singkawang untuk periode 2023-2026 dirumuskan berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Perubahan (RPD). Adapun tujuan dan sasaran tersebut meliputi:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter, dengan rumusan sasaran:
  - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
  - Meningkatnya kualitas pendidikan
  - Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya
  - Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga
  - Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan bertumpu pada percepatan sektor strategis untuk penurunan kemiskinan, dengan rumusan sasaran:



- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM
  - Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan
  - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
  - Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan
  - Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, dengan rumus sasaran :
- Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar
  - Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi
  - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola
  - Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi, dengan rumus sasaran:
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
  - Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah
  - Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik
  - Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.

## BAB II

### ARSITEKTUR PROSES BISNIS

#### 2.1. Identifikasi Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Referensi arsitektur aplikasi SPBE atau yang disingkat RAL berlandaskan Arsitektur SPBE Nasional yang diklasifikasikan kedalam 4 tingkatan yaitu :

- a. sektor pemerintahan, yang mengelompokkan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. urusan pemerintahan, yang menjelaskan turunan dari sektor pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. fungsi pemerintahan, yang menjelaskan lebih rinci dari urusan pemerintahan di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional;
- d. sub fungsi pemerintahan yang menjelaskan lebih rinci dari fungsi pemerintahan sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat men5rusun pada stntktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

Pemerintah Daerah akan mendefinisikan tingkatan 3 (tiga) dan tingkatan 4 (empat). Proses klasifikasi dan identifikasi RAB pada struktur domain di tingkat nasional menjadi pedoman untuk pembentukan Arsitektur SPBE di pemerintah daerah.

Gambar 2.1. 1 Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis SPBE



RAB SPBE Nasional terdiri dari 9 (sembilan) sektor pemerintahan pada tingkat 1 (satu) dan 45 (empat puluh lima) urusan pemerintahan pada tingkat 2 (dua). Dalam penyusunan domain arsitektur proses bisnis, Pemerintah Kota Singakawang mengacu pada RAL SPBE Nasional dan melengkapinya dengan data pada tingkat yang lebih rinci pada tingkat 3 (tiga) dan tingkat 4 (empat). Berikut ini adalah referensi arsitektur proses bisnis yang disusun berdasarkan struktur tersebut.

Tabel 2.1. 1 Taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis



<b>Kode</b>	<b>Referensi Arsitektur</b>	<b>Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis</b>
Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara.
01.02	Hubungan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar negeri.
Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan industri.
02.02	Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan.
02.03	Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian.
02.04	Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perkebunan.
02.05	Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan.
02.06	Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perikanan.
02.07	Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08	Investasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan penanaman modal.
02.09	Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan koperasi.
02.10	Usaha Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan.
Pembangunan Kewilayahan (03)		
03.01	Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum.
03.02	Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi.
03.03	Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi.
03.04	Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan.

<b>Kode</b>	<b>Referensi Arsitektur</b>	<b>Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis</b>
03.05	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
03.06	Pertanahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan.
03.07	Kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.
<b>Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)</b>		
04.01	Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
04.02	Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.
04.03	Pemberdayaan Perempuan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
<b>Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)</b>		
05.01	Hukum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum.
05.02	Keamanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan.
05.03	Hak Asasi Manusia	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hak asasi manusia.
<b>Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)</b>		
06.01	Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.
06.02	Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan.
06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
06.04	Pemuda	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
06.05	Olahraga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keolahragaan.
<b>Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)</b>		
07.01	Pertambangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan.
07.02	Energi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi.



<b>Kode</b>	<b>Referensi Arsitektur</b>	<b>Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis</b>
07.03	Kehutanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan.
07.04	Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan.
07.05	Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup.
Budaya dan Agama (08)		
08.01	Agama	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang agama.
08.02	Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan.
Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang dalam negeri.
09.02	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara.
09.03	Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi.
09.04	Komunikasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi.
09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional.
09.06	Aparatur Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara.
09.07	Kesekretariatan Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sekretariatan negara.

## 2.2. Identifikasi Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis

Didalam penyusunan Domain Arsitektur Layanan SPBE, pengisian metadata berlandaskan SE Menpan-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 2.2. 1 Atribut Metadata Arsitektur Data dan Informasi

<b>No.</b>	<b>Nama Atribut</b>	<b>Keterangan</b>
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata

No.	Nama Atribut	Keterangan
2.	Nama Bisnis/Urusan	Merupakan urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.
3.	Uraian Bisnis/Urusan	Merupakan uraian dari urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.
4.	Kode Model Referensi	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama bisnis/urusan yang dipilih
5.	Sasaran Strategis	Merupakan sasaran strategis IPPD
6.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Merupakan indikator yang merupakan ukuran keberhasilan dari sasaran strategis
7.	Nilai IKU Target	Nilai yang IKU yang ditargetkan
8.	Nilai IKU Realisasi	Nilai yang IKU yang dicapai
9.	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

### 2.3. Identifikasi Domain Proses Bisnis

#### 1. Sekretariat Daerah

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Sekretariat Daerah memiliki 1 (satu) tujuan, yakni **Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah**. Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang sekretariat daerah, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH. Berikut merupakan tabel yang memuat 2 Proses Bisnis yang ada pada Sekretariat Daerah :

Tabel 2.3. 1 Proses Bisnis Sekretariat Daerah

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.01.05.01	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.01.05.02	Perekonomian Dan Pembangunan

#### 2. Sekretariat DPRD

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Sekretariat DPRD memiliki 1 (satu) tujuan, yakni **Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah**. Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang sekretariat DPRD, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH. Berikut merupakan tabel yang memuat 1 Proses Bisnis yang ada pada Sekretariat DPRD :

Tabel 2.3. 2 Proses Bisnis Sekretariat DPRD



No	ID	Nama Bisnis/Urusan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.01.01.01	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

### 3. Inspektorat Daerah

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Inspektorat Daerah memiliki 1 (satu) tujuan, yakni **Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah**. Dalam kaitannya dengan urusan inspektorat daerah, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA. Berikut merupakan tabel yang memuat 2 Proses Bisnis yang ada pada Inspektorat Daerah :

Tabel 2.3. 3 Proses Bisnis Inspektorat Daerah

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.06.04.01	Penyelenggaraan Pengawasan
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.06.04.02	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

### 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 2 (dua) tujuan, yakni **Meningkatnya kualitas pendidikan** dan **Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya**. Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAB.06.01.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- RAB.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
- RAB.06.01.03 PENDIDIKAN NON FORMAL
- RAB.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN

Berikut merupakan tabel yang memuat 9 Proses Bisnis yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

Tabel 2.3. 4 Proses Bisnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.06.01.02.01	Pengelolaan Pendidikan Dasar
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.06.01.02.02	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.06.01.03.01	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.06.01.02.03	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.06.01.02.03	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.06.01.01.01	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.08.02.01.01	Pengembangan Kebudayaan
8.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.08.02.01.02	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
9.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.08.02.01.03	Pengembangan Kesenian Tradisional

#### 5. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana memiliki 2 (dua) tujuan, yakni **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** dan **Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah**. Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAB.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK,
- RAB.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI,
- RAB.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA,
- RAB.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,
- RAB.04.01.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN,
- RAB.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT.

Berikut merupakan tabel yang memuat 7 Proses Bisnis yang ada pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana :

Tabel 2.3. 5 Proses Bisnis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.04.01.06.01	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.04.01.02.01	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.04.01.01.01	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.04.01.06.02	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.07.01.01	Pengendalian Penduduk



No	ID	Nama Bisnis/Urusan
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.07.02.01	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
7.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.07.03.01	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 3 (tiga) tujuan, yakni **Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan, Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan dan Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi.** Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR,
- RAB.03.01.02 PENGELOLAAN PEREKAYASAAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN ADMINISTRATIF BIDANG PUPR,
- RAB.03.04.02 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN,
- RAB.03.04.03 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA STRATEGIS,
- RAB.03.04.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN,
- RAB.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG,
- RAB.03.06.05 PENGADAAN TANAH DAN PENCADANGAN TANAH,
- RAB.03.06.08 PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH,
- RAB.03.06.09 PENANGANAN SENGKETA KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN,
- RAB.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH.

Berikut merupakan tabel yang memuat 11 Proses Bisnis yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

Tabel 2.3. 6 Proses Bisnis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.01.01.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.01.01.02	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.07.05.04.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.01.01.03	Penyelenggaraan Jalan
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.01.02.01	Pengembangan Jasa Konstruksi

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.01.01.04	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
7.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.04.02.03	Pengembangan Permukiman
8.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.01.01.05	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
9.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.01.01.06	Penataan Bangunan Gedung
10.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.01.01.07	Penyelenggaraan Penataan Ruang
11.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.01.01.08	Penataan Bangunan dan Lingkungannya

#### 7. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan memiliki 2 (dua) tujuan, yakni **Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan** dan **Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar**. Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAB.03.04.02 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
- RAB.03.04.03 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA STRATEGIS
- RAB.03.04.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
- RAB.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG
- RAB.03.06.05 PENGADAAN TANAH DAN PENCADANGAN TANAH
- RAB.03.06.08 PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
- RAB.03.06.09 PENANGANAN SENGKETA KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN

Berikut merupakan tabel yang memuat 10 Proses Bisnis yang ada pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan :

Tabel 2.3. 7 Proses Bisnis Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.04.02.01	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.04.04.01	Pengembangan Perumahan
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.04.03.01	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.04.02.02	Kawasan Permukiman

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.06.09.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.06.05.01	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
7.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.06.05.02	Penetapan Tanah Ulayat
8.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.06.08.01	Pengelolaan Tanah Kosong
9.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.06.08.02	Pengelolaan Izin Membuka Tanah
10.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.06.01.01	Penatagunaan Tanah

#### 8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 2 (dua) tujuan, yakni **Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial** dan **Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah**. Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAB.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL,
- RAB.04.02.02 PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL,
- RAB.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL,
- RAB.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL,
- RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA,
- RAB.04.03.01 KESETARAAN GENDER,
- RAB.04.03.02 PEMENUHAN HAK ANAK,
- RAB.04.03.03 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN,
- RAB.04.03.04 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK.

Berikut merupakan tabel yang memuat 11 Proses Bisnis yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

Tabel 2.3. 8 Proses Bisnis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.04.03.01.01	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.04.03.03.01	Perlindungan Perempuan



No	ID	Nama Bisnis/Urusan
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.04.03.03.02	Peningkatan Kualitas Keluarga
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.04.03.02.01	Pemenuhan Hak Anak (PHA)
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.04.03.04.01	Perlindungan Khusus Anak
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.04.03.02.02	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
7.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.04.02.04.01	Pemberdayaan Sosial
8.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.04.02.01.01	Rehabilitasi Sosial
9.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.04.02.03.01	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
10.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.04.02.02.01	Perlindungan dan Jaminan Sosial
11.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.04.02.06.01	Penanganan Bencana

#### 9. Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja memiliki 1 (satu) tujuan, yakni **Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan**. Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAB.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL,
- RAB.02.08.03 PROMOSI PENANAMAN MODAL,
- RAB.02.08.04 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL,
- RAB.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,
- RAB.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,
- RAB.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,
- RAB.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

Berikut merupakan tabel yang memuat 9 Proses Bisnis yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja :

Tabel 2.3. 9 Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.08.01.01	Pengembangan Iklim Penanaman Modal

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.08.03.01	Promosi Penanaman Modal
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.08.04.01	Pelayanan Penanaman Modal
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.08.06.01	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.08.04.02	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.06.02.02.01	Penempatan Tenaga Kerja
7.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.06.02.03.01	Hubungan Industrial
8.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.06.02.01.01	Perencanaan Tenaga Kerja
9.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.06.02.01.02	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

#### 10. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan memiliki 1 (satu) tujuan, yakni **Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan**. Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang bidang kelautan dan perikanan serta bidang pangan, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAB.02.03.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA,
- RAB.02.03.07 PENGEMBANGAN KUALITAS SDM PERTANIAN,
- RAB.02.03.15 PENGELOLAAN IRIGASI PERTANIAN, KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP,
- RAB.02.03.18 PENGELOLAAN LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG PERTANIAN DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN,
- RAB.02.03.19 KETERSEDIAAN PANGAN,
- RAB.02.03.21 KERAWANAN PANGAN DAN GIZI,
- RAB.02.03.22 KEAMANAN PANGAN,
- RAB.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP,
- RAB.02.06.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA,
- RAB.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN,
- RAB.02.06.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN.

Berikut merupakan tabel yang memuat 14 Proses Bisnis yang ada pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan:

Tabel 2.3. 10 Proses Bisnis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.03.15.01	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.03.03.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.03.15.02	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.03.19.01	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.03.22.01	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.03.07.01	Penyuluhan Pertanian
7.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.03.18.01	Perizinan Usaha Pertanian
8.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.06.01.01	Pengelolaan Perikanan Tangkap
9.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.06.02.01	Pengelolaan Perikanan Budidaya
10.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.06.03.01	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
11.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.06.04.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
12.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.03.21.01	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
13.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.03.21.02	Penanganan Kerawanan Pangan
14.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.03.22.02	Pengawasan Keamanan Pangan

#### 11. Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Dinas Lingkungan Hidup memiliki 1 (satu) tujuan, yakni **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola**. Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAB.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN,
- RAB.07.05.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN,
- RAB.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH,
- RAB.07.05.05 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN,
- RAB.07.05.07 PENYELENGGARAAN KEMITRAAN LINGKUNGAN.



Berikut merupakan tabel yang memuat 9 Proses Bisnis yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup:

Tabel 2.3. 11 Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.07.05.03.01	Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.07.05.01.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.07.05.07.01	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.07.05.07.02	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.07.05.01.02	Perencanaan Lingkungan Hidup
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.07.05.04.02	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
7.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.07.05.07.03	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
8.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.07.05.05.01	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
9.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.07.05.04.03	Pengelolaan Persampahan

## 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 1 (satu) tujuan, yakni **Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah**. Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

Berikut merupakan tabel yang memuat 4 Proses Bisnis yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

Tabel 2.3. 12 Proses Bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.01.07.01	Pendaftaran Penduduk
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.01.07.02	Pencatatan Sipil

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.01.07.03	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.01.07.04	Pengelolaan Profil Kependudukan

### 13. Dinas Perhubungan

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Dinas Perhubungan memiliki 1 (satu) tujuan, yakni **Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi**. Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang perhubungan, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAB.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI.

Berikut merupakan tabel yang memuat 2 Proses Bisnis yang ada pada Dinas Perhubungan :

Tabel 2.3. 13 Proses Bisnis Dinas Perhubungan

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.03.01.01	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj)
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.03.01.02	Pengelolaan Penerbangan

### 14. Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 1 (satu) tujuan, yakni **Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah**. Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAB.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA,
- RAB.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK,
- RAB.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK,
- RAB.09.03.08 MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI.

Berikut merupakan tabel yang memuat 4 Proses Bisnis yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika :

Tabel 2.3. 14 Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.03.03.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.03.02.01	Pengelolaan Aplikasi Informatika
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.03.08.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.03.04.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral

15. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki 1 (satu) tujuan, yakni **Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah**. Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAB.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI,
- RAB.02.01.06 PEMERATAAN PERSEBARAN INDUSTRI,
- RAB.02.02.01 Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri,
- RAB.02.02.03 Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,
- RAB.02.09.01 Pembinaan Koperasi,
- RAB.02.09.04 Pengawasan Koperasi,
- RAB.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Berikut merupakan tabel yang memuat 12 Proses Bisnis yang ada pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :

Tabel 2.3. 15 Proses Bisnis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.09.04.01	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.09.04.02	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.09.01.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.10.02.01	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.10.02.02	Pengembangan UMKM
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.02.01.01	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
7.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.02.03.01	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
8.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.02.01.02	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri



No	ID	Nama Bisnis/Urusan
9.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.02.03.02	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
10.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.02.01.03	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
11.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.01.01.01	Perencanaan dan Pembangunan Industri
12.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.01.06.01	Pengendalian Izin Usaha Industri

#### 16. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memiliki 2 (dua) tujuan, yakni **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif** dan **Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga**. Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAB.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA
- RAB.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA
- RAB.02.11.03 INDUSTRI PARIWISATA
- RAB.02.11.04 PEMASARAN PARIWISATA
- RAB.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA
- RAB.06.05.02 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Berikut merupakan tabel yang memuat 7 Proses Bisnis yang ada pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga :

Tabel 2.3. 16 Proses Bisnis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.06.05.02.01	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.06.04.02.01	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.06.04.02.02	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.11.02.01	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.11.04.01	Pemasaran Pariwisata
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.11.01.01	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.02.11.03.01	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

#### 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki 1 (satu) tujuan, yakni **Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah**. Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAB.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN,
- RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.

Berikut merupakan tabel yang memuat 3 Proses Bisnis yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan :

Tabel 2.3. 17 Proses Bisnis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.08.02.06.01	Pembinaan Perpustakaan
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.06.06.01	Pengelolaan Arsip
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.06.06.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

#### 18. Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 1 (satu) tujuan, yakni **Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum**. Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA,
- RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT,

Berikut merupakan tabel yang memuat 2 Proses Bisnis yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja :

Tabel 2.3. 18 Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.05.02.01.02	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.04.02.06.03	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

#### 19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki 1 (satu) tujuan, yakni **Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah**. Dalam kaitannya dengan urusan

pemerintahan bidang perencanaan, bidang keuangan dan bidang penelitian dan pengembangan, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM,
- RAB.09.01.03 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN.

Berikut merupakan tabel yang memuat 3 Proses Bisnis yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

Tabel 2.3. 19 Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.01.03.01	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.01.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.01.01.03	Penelitian dan Pengembangan Daerah

#### 20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki 1 (satu) tujuan, yakni Opini BPK terhadap Laporan Keuangan. Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang keuangan, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAB.09.01.06 PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH,
- RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Berikut merupakan tabel yang memuat 2 Proses Bisnis yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

Tabel 2.3. 20 Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.01.06.01	Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.02.11.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah

#### 21. Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Badan Pendapatan Daerah memiliki 1 (satu) tujuan, yakni Opini BPK terhadap Laporan Keuangan. Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang keuangan, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAB.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA.

Berikut merupakan tabel yang memuat 1 Proses Bisnis yang ada pada Badan Pendapatan Daerah :



Tabel 2.3. 21 Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.02.03.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah

## 22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki 1 (satu) tujuan, yakni **Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah**. Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR.

Berikut merupakan tabel yang memuat 2 Proses Bisnis yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :

Tabel 2.3. 22 Proses Bisnis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.06.03.01	Kepegawaian Daerah
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.06.03.02	Pengembangan Sumber Daya Manusia

## 23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 1 (satu) tujuan, yakni **Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik**. Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM,
- RAB.09.01.06 PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH.

Berikut merupakan tabel yang memuat 5 Proses Bisnis yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

Tabel 2.3. 23 Proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.01.01.04	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.01.01.05	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.01.01.06	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.01.06.02	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.01.01.07	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

#### 24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 1 (satu) tujuan, yakni **Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum**. Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

Berikut merupakan tabel yang memuat 1 Proses Bisnis yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

Tabel 2.3. 24 Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	ID	Nama Bisnis/Urusan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.04.02.06.02	Pengelolaan Penanggulangan Bencana

#### 25. Kecamatan (5)

Berdasarkan RPD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, 5 Kecamatan yang terdiri dari, Singkawang Utara, Singkawang Tengah, Singkawang Selatan, Singkawang Barat dan Singkawang Timur memiliki 1 (satu) tujuan, yakni **Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan**. Dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan bidang kecamatan administrasi, referensi arsitektur proses bisnis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAB.03.05.04 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN,
- RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT,
- RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM,
- RAB.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.

Berikut merupakan tabel yang memuat 4 Proses Bisnis yang ada pada Seluruh Kecamatan :

Tabel 2.3. 25 Proses Bisnis Kecamatan

<b>No</b>	<b>ID</b>	<b>Nama Bisnis/Urusan</b>
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.06.05.01	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.03.05.04.01	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.05.02.01.01	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAB.09.01.01.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

## BAB III

### ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI

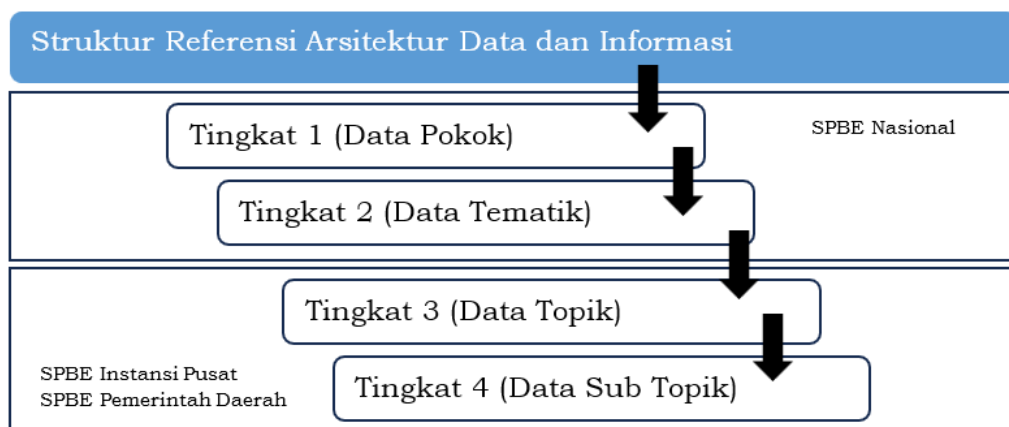
#### 3.1. Identifikasi Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Referensi arsitektur data dan informasi berlandaskan pada Arsitektur SPBE Nasional. Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) berfungsi sebagai panduan untuk mengklasifikasikan data yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa data yang disajikan lebih akurat dan berkualitas, sehingga mampu mendukung layanan pemerintah yang dibutuhkan. Dalam domain arsitektur data dan informasi, data yang dihasilkan dari berbagai kegiatan dalam proses bisnis pemerintahan kemudian diklasifikasikan berdasarkan substansi data dan informasi. Struktur referensi arsitektur data dan informasi ini dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu :

- Data pokok, pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data yang dihasilkan pada sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai tingkat 1 (kesatu), yang menjadi struktur di tingkat nasional
- Data tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, dikelompokkan ke dalam data tematik urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional
- Data topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data tematik di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional
- Data sub topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data topik sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam membangun layanan terintegrasi sebagai bagian dari layanan digital nasional, serta kebutuhan operasional aplikasi.

Pemerintah Daerah akan mendefinisikan tingkatan 3 (tiga) dan tingkatan 4 (empat). Proses klasifikasi dan identifikasi RAD pada struktur domain di tingkat nasional menjadi pedoman untuk pembentukan Arsitektur SPBE di pemerintah daerah. Data dan informasi ini akan menjadi masukan penting dalam operasional berbagai fungsi pada aplikasi SPBE hingga tercapainya layanan pemerintah yang diinginkan.

Gambar 3.1. 1 Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi





RAD SPBE Nasional terdiri dari 10 (sepuluh) data pokok pada tingkat 1 (satu) dan 49 (empat puluh sembilan) data tematik pada tingkat 2 (dua). Dalam penyusunan domain arsitektur data dan informasi, Pemerintah Kota Singakawang mengacu pada RAD SPBE Nasional dan melengkapinya dengan data pada tingkat yang lebih rinci pada tingkat 3 (tiga) dan tingkat 4 (empat). Berikut ini adalah referensi arsitektur data dan informasi yang disusun berdasarkan struktur tersebut.

Tabel 3.1. 1 Taksonomi Referensi Arsitektur Data dan Informasi

<b>Kode</b>	<b>Referensi Arsitektur</b>	<b>Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi</b>
Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Data Pertahanan	Data yang memrepresentasikan bidang pertahanan negara.
01.02	Data Hubungan Luar Negeri	Data yang merepresentasikan bidang hubungan luar negeri.
Informasi Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Data Industri	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan industri.
02.02	Data Perdagangan	Data yang merepresentasikan bidang perdagangan.
02.03	Data Pertanian	Data yang merepresentasikan bidang pertanian.
02.04	Data Perkebunan	Data yang merepresentasikan bidang perkebunan.
02.05	Data Peternakan	Data yang merepresentasikan bidang peternakan.
02.06	Data Perikanan	Data yang merepresentasikan bidang perikanan.
02.07	Data Badan Usaha Milik Negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08	Data Investasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan penanaman modal.
02.09	Data Koperasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan koperasi.
02.10	Data Usaha Kecil dan Menengah	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Data Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan.
Informasi Pembangunan Kewilayahan (03)		

<b>Kode</b>	<b>Referensi Arsitektur</b>	<b>Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi</b>
03.01	Data Pekerjaan Umum	Data yang merepresentasikan bidang pekerjaan umum.
03.02	Data Transmigrasi	Data yang merepresentasikan bidang transmigrasi.
03.03	Data Transportasi	Data yang merepresentasikan bidang transportasi.
03.04	Data Perumahan	Data yang merepresentasikan bidang perumahan.
03.05	Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Data yang merepresentasikan bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
03.06	Data Pertanahan	Data yang merepresentasikan bidang pertanahan.
03.07	Data Kependudukan	Data yang merepresentasikan bidang kependudukan.
<b>Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)</b>		
04.01	Data Kesehatan	Data yang merepresentasikan bidang kesehatan.
04.02	Data Sosial	Data yang merepresentasikan bidang sosial.
04.03	Data Pemberdayaan Perempuan	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan perempuan.
<b>Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)</b>		
05.01	Data Hukum	Data yang merepresentasikan bidang hukum.
05.02	Data Keamanan	Data yang merepresentasikan bidang keamanan.
05.03	Data Hak Asasi Manusia	Data yang merepresentasikan bidang hak asasi manusia.
<b>Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)</b>		
06.01	Data Pendidikan	Data yang merepresentasikan bidang pendidikan.
06.02	Data Ketenagakerjaan	Data yang merepresentasikan bidang ketenagakerjaan.
06.03	Data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Data yang merepresentasikan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

<b>Kode</b>	<b>Referensi Arsitektur</b>	<b>Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi</b>
06.04	Data Pemuda	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
06.05	Data Olahraga	Data yang merepresentasikan bidang keolahragaan.
Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Data Pertambangan	Data yang merepresentasikan bidang pertambangan.
07.02	Data Energi	Data yang merepresentasikan bidang energi.
07.03	Data Kehutanan	Data yang merepresentasikan bidang kehutanan.
07.04	Data Kelautan	Data yang merepresentasikan bidang kelautan.
07.05	Data Lingkungan Hidup	Data yang merepresentasikan bidang lingkungan hidup.
Informasi Budaya dan agama (08)		
08.01	Data Agama	Data yang merepresentasikan bidang agama.
08.02	Data Kebudayaan	Data yang merepresentasikan bidang kebudayaan.
Informasi Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Data Dalam Negeri	Data yang merepresentasikan bidang dalam negeri.
09.02	Data Keuangan	Data yang merepresentasikan bidang keuangan negara.
09.03	Data Informasi	Data yang merepresentasikan bidang informasi.
09.04	Data Komunikasi	Data yang merepresentasikan bidang komunikasi.
09.05	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Data yang merepresentasikan bidang perencanaan pembangunan nasional.
09.06	Data Aparatur Negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan aparatur negara.
09.07	Data Kesekretariatan Negara	Data yang merepresentasikan bidang kesekretariatan negara.
Data Pendukung Umum (10)		

<b>Kode</b>	<b>Referensi Arsitektur</b>	<b>Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi</b>
10.01	Data Kebijakan Pemerintah	Data yang merepresentasikan informasi terkait kebijakan pemerintah.
10.02	Data Manajemen Kegiatan	Data yang merepresentasikan informasi terkait manajemen kegiatan pemerintahan.
10.03	Data Kewilayahan	Data yang merepresentasikan informasi kewilayahan.
10.04	Data Dukung Lainnya	Data yang merepresentasikan informasi yang tidak tercakup dalam definisi lainnya.

### **3.2. Identifikasi Atribut Metadata Arsitektur Data dan Informasi**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, metadata adalah informasi terstruktur yang memberikan deskripsi mendetail tentang suatu set data. Metadata mempermudah penemuan, penggunaan, dan pengelolaan data dengan memberikan konteks yang jelas tentang isi, sumber dan tujuan data tersebut. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap data yang dihasilkan oleh instansi pemerintah harus dilengkapi dengan metadata untuk memastikan transparansi, akurasi, dan keterbukaan data.

Dalam konteks Arsitektur SPBE di Pemerintah Kota Singkawang, identifikasi atribut metadata bertujuan untuk menciptakan pengelolaan data yang efisien dan terpadu dalam berbagai aspek pemerintahan. Berikut merupakan tabel atribut metadata yang sesuai dengan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE :

Tabel 3.2. 1 Atribut Metadata Arsitektur Data dan Informasi

<b>No.</b>	<b>Nama Atribut</b>	<b>Keterangan</b>
10.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
11.	Nama Data	Merupakan data yang dikelola oleh unit kerja/perangkat daerah.
12.	Uraian Data	Merupakan penjelasan atau keterangan dari data, terutama mengenai ciri khas dari data tersebut.
13.	Tujuan Data	Merupakan penjelasan tujuan dari pemanfaatan data
14.	Kode Model Referensi Data	Merupakan pilihan kode model referensi data yang sesuai dengan data yang dipilih
15.	Sifat Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan kerahasiaan konten data



No.	Nama Atribut	Keterangan
16.	Jenis Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk datanya
17.	Validitas Data	Merupakan tanggal berlakunya data
18.	Penghasil Data/Produsen Data	Merupakan penghasil data
19.	Penanggung Jawab Data/Wali Data	Merupakan penanggung jawab data
20.	Informasi yang terkait ( <i>output</i> )	Merupakan keterhubungan terhadap informasi yang dihasilkan
21.	Informasi yang terkait ( <i>input</i> )	Merupakan keterhubungan terhadap informasi yang dibutuhkan
22.	Interoperabilitas	Merupakan penjelasan apakah terdapat interoperabilitas data dengan data yang lain
23.	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

### 3.3. Identifikasi Domain Data dan Informasi Tiap Perangkat Daerah

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang struktur data dan informasi yang ada, berikut merupakan data dan informasi berdasarkan Perangkat Daerah sebagai produsen data. Data ini diambil dari Metadata Statistik Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan data yang efisien dan terpadu dalam berbagai aspek pemerintahan. Data dan informasi yang dihasilkan oleh produsen data merupakan jenis data statistik yang bersifat terbuka dan memiliki validitas tahunan.

#### 1. Data dan Informasi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah memiliki 6 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang sekretariat daerah. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM,
- RAD.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH,
- RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 1 Data dan Informasi Sekretariat Daerah

No	ID	Nama Data
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.01.01.01	Data Tercapainya IKK yang Terpenuhi oleh Perangkat Daerah
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.01.01.02	Data Tindaklanjut Perda

No	ID	Nama Data
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.01.05.01	Data Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.01.05.02	Data Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Ditindaklanjuti
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.01.05.03	Data Capaian Realisasi Fisik Perangkat Daerah
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.02.11.01	Data Keberhasilan Pelaksanaan Tender

## 2. Data dan Informasi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki 1 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang sekretariat DPRD. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM.

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 2 Data dan Informasi Sekretariat DPRD

No	ID	Nama Data
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.01.02.06	Data Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

## 3. Data dan Informasi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah memiliki 8 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang inspektorat daerah. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA.

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 3 Data dan Informasi Inspektorat Daerah

No	ID	Nama Data
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.06.04.01	Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Kota (Internal)

No	ID	Nama Data
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.06.04.02	Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi (Eksternal)
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.06.04.03	Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK (Eksternal)
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.06.04.04	Data Penyelesaian Kasus Pengaduan dan Pemeriksaan Khusus
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.06.04.05	Data Penyelesaian Masalah Perangkat Daerah melalui Pemberian Advis
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.06.04.06	Data Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Risiko Operasional
7.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.06.04.07	Data Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Risiko Korupsi
8.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.06.04.08	Data Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP BB pada Wilayah Kerja Irban

#### 4. Data dan Informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 32 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAD.06.01.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,
- RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH,
- RAD.06.01.03 PENDIDIKAN NON FORMAL,
- RAD.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN.

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 4 Data dan Informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	ID	Nama Data
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.02.01	Data Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.02.02	Data Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.02.03	Data Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.02.04	Data Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat

<b>No</b>	<b>ID</b>	<b>Nama Data</b>
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.02.05	Data Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.02.06	Data Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Sederajat
7.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.02.07	Data Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Sederajat
8.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.02.08	Data Angka Pendidikan yang Ditamatkan Jenjang SD/MI/Sederajat
9.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.02.09	Data Angka Pendidikan yang Ditamatkan Jenjang SMP/MTs/Sederajat
10.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.02.10	Data Angka Putus Sekolah SD/MI
11.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.02.11	Data Angka Putus Sekolah SMP/MTs
12.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.02.12	Data Angka Kelulusan SD/MI
13.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.02.13	Data Angka Kelulusan SMP/MTs
14.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.02.14	Data Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs
15.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.02.15	Data Ruang Kelas SD/MI dalam Kondisi Baik
16.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.02.16	Data Ruang Kelas SMP/MTs dalam Kondisi Baik
17.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.02.17	Data Rasio Ketersediaan SD/MI terhadap Penduduk Usia 7-12 Tahun
18.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.02.18	Data Rasio Ketersediaan SMP/MTs terhadap Penduduk Usia 13-15 Tahun
19.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.03.01	Data Lembaga PKBM yang Terakreditasi B
20.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.02.19	Data Penerapan Kurikulum Mulok di Pendidikan Dasar
21.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.02.20	Data Penerapan Kurikulum Mulok di Pendidikan Anak Usia Dini
22.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.01.01	Data Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Jenjang SD/MI
23.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.01.02	Data Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Jenjang SMP/MTs



No	ID	Nama Data
24.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.01.03	Data Rasio Guru SD/MI terhadap Murid SD/MI
25.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.01.04	Data Rasio Guru SMP/MTs terhadap Murid SMP/MTs
26.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.01.05	Data Rasio Guru SD/MI terhadap Murid per Kelas
27.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.01.01.06	Data Rasio Guru SMP/MTs terhadap Murid per Kelas
28.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.08.02.01.01	Data Kekayaan Budaya yang Dikelola
29.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.08.02.01.02	Data Cakupan Pelaku Keragaman Budaya yang Dibina
30.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.08.02.01.03	Data Peningkatan Seni Budaya Yang Dilestarikan
31.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.08.02.01.04	Data Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
32.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.08.02.01.05	Data Kelestarian Cagar Budaya

#### 5. Data dan Informasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana memiliki 7 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAD.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK,
- RAD.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA,
- RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,
- RAD.04.01.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN,
- RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN,
- RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT.

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 5 Data dan Informasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No	ID	Nama Data
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.04.01.06.01	Data dari SPM Bidang Kesehatan

No	ID	Nama Data
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.04.01.01.01	Data Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.04.01.02.01	Data Instalasi Farmasi Kota Singkawang Menerapkan Manajemen Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman sesuai Standar
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.04.01.06.02	Data UKBM yang Mengalami Pengembangan dan Peningkatan
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.04.01.04.01	Data TFR (Total Fertility Rate)
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.07.01.01	Data Rasio Akseptor KB
7.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.07.03.01	Data Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

#### 6. Data dan Informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 11 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR,
- RAD.03.01.04 PENGELOLAAN KERJA SAMA DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR,
- RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR,
- RAD.03.04.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG,
- RAD.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH.

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 6 Data dan Informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	ID	Nama Data
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.01.01.01	Data Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kab/Kota
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.01.01.02	Data Rumah Tangga yang Terlayani Air Bersih Perpipaian dan Non Perpipaian Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.07.05.04.01	Data Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Regional

No	ID	Nama Data
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.01.01.03	Data Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.01.05.01	Data Drainase yang Terbangun
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.01.01.04	Data Jalan Permukiman dalam Kondisi Baik
7.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.01.01.05	Data Bangunan Gedung Daerah Kota dalam Kondisi Baik
8.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.04.01.01	Data Kawasan yang Tertata
9.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.01.01.06	Data Jalan dalam Kondisi Baik
10.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.01.01.07	Data Jasa Konstruksi yang Layak
11.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.01.04.01	Data Rencana Tata Ruang

#### 7. Data dan Informasi Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan memiliki 12 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAD.03.04.02 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN,
- RAD.03.04.03 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA STRATEGIS,
- RAD.03.04.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN,
- RAD.03.06.02 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG,
- RAD.03.06.03 KEPASTIAN HAK ATAS TANAH DAN RUANG,
- RAD.03.06.05 PENGADAAN TANAH DAN PENCADANGAN TANAH,
- RAD.03.06.06 PENGEMBANGAN EKONOMI PERTANAHAN,
- RAD.03.06.08 PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH,
- RAD.03.06.09 PENANGANAN SENGKETA KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN.

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 7 Data dan Informasi Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan

No	ID	Nama Data
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.04.04.01	Data Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.04.02.01	Data Luasan Kawasan Permukiman Kumuh( dengan Luas di Bawah 10 ha) yang ditangani
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.04.02.02	Data Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha)
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.04.04.02	Data Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang Ditangani
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.04.04.03	Data Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha)
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.04.03.01	Data Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang Ditangani
7.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.06.09.01	Data Sengketa Tanah Garapan yang Difasilitasi
8.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.06.05.01	Data Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan
9.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.06.03.01	Data Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/Hukum Adat/Kas Desa
10.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.06.06.01	Persentase Luas Potensi Pemanfaatan atas Tanah Kosong yang Sudah Diinventarisasi
11.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.06.08.01	Data Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)
12.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.06.02.01	Data Luas Wilayah yang Sudah Terpetakan

8. Data dan Informasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 13 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITASI SOSIAL,
- RAD.04.02.02 PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL,
- RAD.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL,
- RAD.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL,
- RAD.04.02.05 SISTEM PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL,
- RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA,
- RAD.04.03.01 KESETARAAN GENDER,
- RAD.04.03.02 PEMENUHAN HAK ANAK,
- RAD.04.03.03 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN,
- RAD.04.03.04 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK.

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 8 Data dan Informasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	ID	Nama Data
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.04.03.04.02	Data Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Pelayanan secara Komprehensif
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.04.03.04.01	Data Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.04.03.03.02	Data Penyediaan Dokumen Data Profil Gender yang Mutakhir
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.04.03.03.01	Data Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Berbasis Gender yang Ditindaklanjuti
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.04.03.05.01	Data Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Dilayani sesuai Standar
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.04.03.02.01	Data Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
7.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.04.02.01.01	Data Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
8.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.04.02.06.03	Data Penanganan Bencana Skala Kota

No	ID	Nama Data
9.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.04.02.05.01	Data Kesejahteraan/Kemandirian Keluarga Miskin
10.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.04.02.03.05	Data Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Fakir Miskin
11.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.04.02.03.03	Data Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
12.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.04.02.03.02	Data Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
13.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.04.02.03.01	Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Telah Diberdayakan

#### 9. Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja memiliki 9 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAD.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
- RAD.02.08.02 KERJA SAMA PENANAMAN MODAL
- RAD.02.08.03 PROMOSI PENANAMAN MODAL
- RAD.02.08.04 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
- RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
- RAD.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
- RAD.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
- RAD.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
- RAD.06.02.04 PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 9 Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja

No	ID	Nama Data
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.02.04.01	Data Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.02.01.01	Data Besaran Pencari Kerja yang Dilatih Lulus Uji Kompetensi

No	ID	Nama Data
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.02.02.01	Data Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada Pasar Kerja
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.02.03.01	Data Perusahaan yang Memenuhi Sarana HI
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.08.01.01	Data Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.08.02.01	Data Jumlah Investor Baru di Kota Singkawang
7.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.08.03.01	Data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan
8.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.08.04.01	Data Perusahaan Melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
9.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.08.06.01	Data Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

10. Data dan Informasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan memiliki 9 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan serta bidang pangan. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAD.02.03.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA,
- RAD.02.03.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA,
- RAD.02.03.05 PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA,
- RAD.02.03.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI,
- RAD.02.03.10 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA,
- RAD.02.03.12 PENGELOLAAN REKOMENDASI KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA,
- RAD.02.03.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN,
- RAD.02.03.14 PENGELOLAAN PUPUK DAN PESTISIDA,
- RAD.02.03.15 PENGELOLAAN IRIGASI PERTANIAN, KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP,
- RAD.02.03.21 KERAWANAN PANGAN DAN GIZI,
- RAD.02.03.22 KEAMANAN PANGAN,

- RAD.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK,
- RAD.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN,
- RAD.02.05.05 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER,
- RAD.02.05.06 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN PETERNAKAN,
- RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP,
- RAD.02.06.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA,
- RAD.02.06.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN,

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 10 Data dan Informasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan

No	ID	Nama Data
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.03.15.01	Data Penyediaan Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.03.14.01	Data Konsumsi Energi (Skor Angka Kecukupan Energi)
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.03.21.01	Data Daerah Rawan Pangan
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.03.22.01	Data Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.06.01.01	Data Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.06.02.01	Data Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
7.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.06.04.01	Data Tingkat Pelanggaran di Perairan Umum
8.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.06.02.02	Data Pelaku Usaha Skala Kecil yang Dibina
9.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.03.13.01	Data Luasan Lahan Pertanian yang Diawasi Penggunaan Sarana Pertanian
10.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.03.05.01	Data Penyediaan Sarana Peternakan
11.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.05.01.01	Data Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Ternak
12.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.03.13.02	Data Ketersediaan Lahan Sawah yang Terpetakan dan Terlindungi

No	ID	Nama Data
13.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.03.01.01	Data Ketersediaan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian
14.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.05.06.01	Data Peningkatan Jumlah Pemotongan Hewan di RPH
15.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.05.04.01	Data Penurunan Penyakit Hewan/Ternak
16.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.05.05.01	Data Pengawasan Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh Halal
17.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.03.04.01	Data Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
18.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.03.12.01	Data Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
19.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.03.10.01	Data Pertimbangan Teknis yang Dikeluarkan
20.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.03.08.01	Data Kelompok Tani Kelas Pemula yang Meningkatkan Skornya

#### 11. Data dan Informasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup memiliki 10 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAD.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN,
- RAD.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP,
- RAD.07.05.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN,
- RAD.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH,
- RAD.07.05.05 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN,
- RAD.07.05.07 PENYELENGGARAAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 11 Data dan Informasi Dinas Lingkungan Hidup

No	ID	Nama Data
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.07.05.01.01	Data Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Strategis yang Wajib Disusun



No	ID	Nama Data
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.07.05.03.01	Data Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.07.05.01.02	Data Pengelolaan RTH
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.07.05.05.01	Data Jumlah Limbah B3 yang Tertangani
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.07.05.07.01	Data Usaha/Kegiatan yang Dibina dan Diawasi
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.07.05.07.02	Data Pendampingan Penghargaan Lingkungan Hidup
7.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.07.05.07.03	Data Dunia Pendidikan/Lembaga Masyarakat yang Berhasil Mendapatkan Penilaian Tingkat Provinsi dan Nasional
8.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.07.05.02.01	Data Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup
9.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.07.05.04.02	Data Cakupan Penanganan Sampah
10.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.07.05.04.03	Data Cakupan Pengurangan Sampah

## 12. Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 9 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAD.03.07.04 PEMBERDAYAAN DAN PERAN MASYARAKAT,
- RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 12 Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	ID	Nama Data
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.01.07.01	Data Penerbitan KK
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.01.07.02	Data Perekaman KTP Elektronik
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.01.07.03	Data Penerbitan KTP Elektronik
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.01.07.04	Data Penerbitan KIA

No	ID	Nama Data
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.01.07.05	Data Penerbitan Akta Kelahiran
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.01.07.06	Data Penerbitan Akta Perkawinan
7.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.07.04.01	Data Peserta yang Memahami Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
8.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.07.04.02	Data OPD yang Telah Menandatangani Perjanjian Kerjasama terkait Pemanfaatan Data Kependudukan
9.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.01.07.07	Data Penyajian Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan

### 13. Data dan Informasi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan memiliki 10 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang perhubungan. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAD.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI,
- RAD.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI,
- RAD.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI,
- RAD.03.03.07 PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN.

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 13 Data dan Informasi Dinas Perhubungan

No	ID	Nama Data
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.03.01.01	Data Ketersediaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.03.02.01	Data Ruas Jalan Bermasalah yang Terawasi
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.03.03.01	Data Sarana dan Prasarana Terminal yang Tersedia
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.03.03.02	Data Peningkatan Ketersediaan Lahan Parkir yang Dikelola
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.03.03.03	Data Lampu PJU terhadap Panjang Jalan Kota dan Jalan Lingkungan yang Terpasang

No	ID	Nama Data
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.03.03.04	Data Ketersediaan Dokumen Rencana Induk PJU
7.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.03.03.05	Data Ketersediaan Jumlah Dokumen Transportasi Darat
8.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.03.01.02	Data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
9.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.03.07.01	Data Pelaksanaan Program Pengelolaan Pelayaran
10.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.03.01.03	Daya Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Bandar Udara

#### 14. Data dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 4 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAD.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA,
- RAD.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK,
- RAD.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK,
- RAD.09.03.08 MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI.

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 14 Data dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika

No	ID	Nama Data
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.03.03.01	Data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Data dan Informasi Publik
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.03.02.01	Data Penerapan Aplikasi E-Government
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.03.04.01	Data Indeks Domain Proses Bisnis Statistik
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.03.08.01	Data Indeks Area Teknologi dan Keamanan Informasi

#### 15. Data dan Informasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki 12 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan

bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI,
- RAD.02.02.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,
- RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI,
- RAD.02.09.02 PENGELOLAAN PRODUKSI DAN PEMASARAN KOPERASI,
- RAD.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI,
- RAD.02.10.01 USAHA MIKRO,
- RAD.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 15 Data dan Informasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	ID	Nama Data
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.09.01.01	Data Koperasi Aktif
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.09.04.01	Data KSP/USP Koperasi yang Meningkatkan Status Kesehatannya
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.09.01.02	Data SDM Pengelola Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.10.01.01	Data Peningkatan Omzet Pelaku Usaha Mikro
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.10.01.02	Data Pertumbuhan Usaha Mikro
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.10.02.01	Data Pertumbuhan Pelaku Usaha Formal
7.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.02.01.01	Data Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik
8.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.02.01.02	Data Distribusi Bahan Pokok dan Barang Penting
9.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.02.03.01	Data Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Sah yang Berlaku
10.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.02.01.03	Data Peningkatan Omset Pelaku Usaha Produk Unggulan
11.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.10.02.02	Data Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah
12.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.09.02.01	Data Jumlah IKM yang Memiliki Legalitas Usaha

## 16. Data dan Informasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Dinas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memiliki 9 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAD.02.01.07 PENGELOLAAN INDUSTRI KREATIF,
- RAD.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA,
- RAD.02.11.05 PENYELENGGARAAN KEGIATAN (EVENTS),
- RAD.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA,
- RAD.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA,
- RAD.06.05.02 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA.

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 16 Data dan Informasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No	ID	Nama Data
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.04.01.01	Data Organisasi Pemuda yang Aktif
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.05.02.01	Data Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keolahragaan
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.05.02.02	Data Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.04.02.01	Data Kelompok Pramuka Aktif
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.11.02.01	Data Destinasi Pariwisata dalam Kondisi Baik
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.11.02.02	Data Peningkatan Destinasi Wisata yang Dikembangkan
7.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.11.05.01	Data Event Pariwisata
8.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.01.07.01	Data Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
9.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.02.01.07.02	Data Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pelaku Ekonomi Kreatif

## 17. Data dan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki 6 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :



- RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI,
- RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 17 Data dan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	ID	Nama Data
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.08.02.05.01	Data Kunjungan ke Perpustakaan
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.08.02.05.02	Data Jumlah Perpustakaan yang Dibina
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.08.02.05.03	Data Peningkatan Kunjungan Perpustakaan Digital
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.06.06.01	Data Perangkat Daerah yang Menerapkan Arsip Digital
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.06.06.02	Data Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.06.06.03	Data Perangkat Daerah yang Arsipnya Diakuisisi

#### 18. Data dan Informasi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 3 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL,
- RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT,
- RAD.05.02.02 PENEGAKAN HUKUM.

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 18 Data dan Informasi Satuan Polisi Pamong Praja

No	ID	Nama Data
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.05.02.01.01	Data Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.05.02.02.01	Data Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada

No	ID	Nama Data
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.04.02.01.01	Data Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

#### 19. Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki 6 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan bidang perencanaan, bidang keuangan dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAD.06.03.02 RISET DAN INOVASI,
- RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
- RAD.09.05.02 PENGANGGARAN PEMBANGUNAN.

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 19 Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	ID	Nama Data
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.05.01.01	Data Konsistensi Program RPJMD/RPD ke dalam RKPD
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.05.02.01	Data Capaian Target Kinerja Indikator Program
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.05.01.02	Data Kesesuaian antar Dokumen RKPD dengan RPJMD/RPD
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.05.01.03	Data Kesesuaian antar Dokumen Renja dengan Renstra
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.03.02.01	Data Hasil Kelitbangan yang Didiseminasikan
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.06.03.02.02	Data Kebijakan Inovasi yang Diterapkan

#### 20. Data dan Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki 5 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan bidang keuangan. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAD.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN,
- RAD.09.02.04 PENGELOLAAN PENGELUARAN DAN BELANJA NEGARA,
- RAD.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN,
- RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 20 Data dan Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	ID	Nama Data
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.02.01.01	Data OPD yang Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Tepat Waktu
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.02.04.01	Data Cakupan Pencapaian Penyerapan Belanja Perangkat Daerah sesuai Target
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.02.08.01	Data OPD yang Telah Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.02.11.02	Data OPD yang Menyampaikan RKBMD Tepat Waktu
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.02.11.03	Data OPD yang Menyampaikan LBMD Tepat Waktu

#### 21. Data dan Informasi Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah memiliki 1 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan bidang keuangan. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA.

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 21 Data dan Informasi Badan Pendapatan Daerah

No	ID	Nama Data
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.02.03.01	Data Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

#### 22. Data dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki 6 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR.

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 22 Data dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	ID	Nama Data
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.06.03.01	Data Fasilitasi Pelayanan Pembinaan Disiplin ASN
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.06.03.02	Data Pemenuhan Formasi Pengadaan ASN
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.06.03.03	Data Pelayanan Administrasi Kepegawaian
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.06.03.04	Data ASN yang Mengikuti Tugas Belajar
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.06.03.05	Data Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi Managerial
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.06.03.06	Data Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional

### 23. Data dan Informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 5 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT,
- RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM.

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 23 Data dan Informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	ID	Nama Data
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.01.01.04	Data Pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.01.01.05	Data Pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.05.02.01.03	Data Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.01.01.06	Data Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

No	ID	Nama Data
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.01.01.07	Data Pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

#### 24. Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 1 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 24 Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	ID	Nama Data
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.04.02.06.01	Data Pelaksanaan Penanggulangan Bencana

#### 25. Data dan Informasi Kecamatan

Kecamatan (5 Kecamatan) memiliki 6 data dan informasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang kecamatan administrasi. Dalam hal ini, referensi arsitektur data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- RAD.03.05.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN,
- RAD.03.05.05 PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN,
- RAD.03.05.11 PENYERASIAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH TERTINGGAL,
- RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT,
- RAD.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.

Berikut merupakan tabel yang menampilkan data dan informasi tersebut:

Tabel 3.3. 25 Data dan Informasi Kecamatan



<b>No</b>	<b>ID</b>	<b>Nama Data</b>
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.05.01.01	Data Pemuktahiran Profil Desa/Kelurahan dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.05.05.01	Data Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Bergerak di Bidang Pemberdayaan Kelurahan
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.09.06.05.01	Data Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.05.11.01	Data Peran Aktif Kelompok/Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.05.02.01.02	Data Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAD.03.05.11.02	Data Kelompok/Lembaga Kemasyarakatan yang Mendapatkan Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Tingkat Kecamatan

Setiap domain data dan informasi yang diidentifikasi di atas, dihasilkan dan dikelola oleh PD yang bersangkutan untuk mendukung proses bisnis utama mereka. Data ini disusun dan dikelola sesuai dengan level RAD yang relevan, memastikan data tersebut dapat digunakan secara efisien dan efektif dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan Kota Singkawang.

## BAB IV

### ARSITEKTUR LAYANAN SPBE

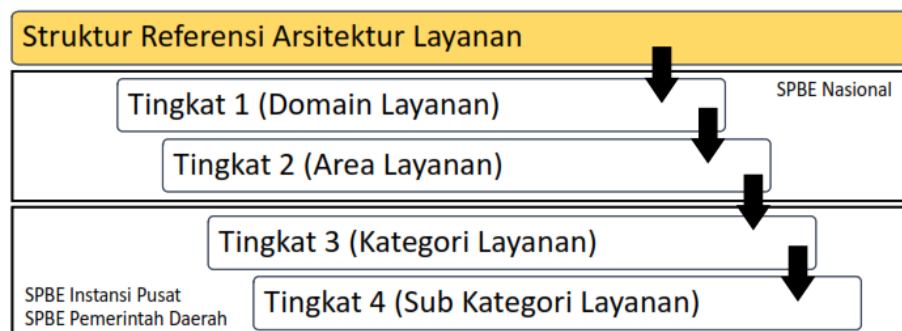
#### 4.1. Identifikasi Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Referensi arsitektur aplikasi SPBE atau yang disingkat RAL berlandaskan Arsitektur SPBE Nasional yang diklasifikasikan kedalam 4 tingkatan yaitu :

- a. domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. area layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. kategori layanan, yang menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
- d. sub kategori layanan, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat men5rusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Pemerintah Daerah akan mendefinisikan tingkatan 3 (tiga) dan tingkatan 4 (empat). Proses klasifikasi dan identifikasi RAD pada struktur domain di tingkat nasional menjadi pedoman untuk pembentukan Arsitektur SPBE di pemerintah daerah.

Gambar 4.1. 1 Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE



RAL SPBE Nasional terdiri dari 2 (dua) domain layanan pada tingkat 1 (satu) dan 53 (lima puluh tiga) area layanan pada tingkat 2 (dua). Dalam penyusunan domain arsitektur layanan SPBE, Pemerintah Kota Singakawang mengacu pada RAL SPBE Nasional dan melengkapinya dengan data pada tingkat yang lebih rinci pada tingkat 3 (tiga) dan tingkat 4 (empat). Berikut ini adalah referensi arsitektur RAL yang disusun berdasarkan struktur tersebut.

Tabel 4.1.1 Taksonomi Referensi Arsitektur Layanan

<b>Kode</b>	<b>Referensi Arsitektur</b>	<b>Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE</b>
Layanan Publik (01)		
01.01	Pertahanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertahanan negara.
01.02	Hubungan Luar Negeri	Kegiatan pelayanan dalam bidang hubungan luar negeri.
01.03	Kenegaraan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kenegaraan.
01.04	Ekonomi	Kegiatan pelayanan dalam bidang perekonomian.
01.05	Industri	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan industri.
01.06	Perdagangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perdagangan.
01.07	Pertanian	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanian.
01.08	Perkebunan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perkebunan.
01.09	Peternakan	Kegiatan pelayanan dalam bidang peternakan.
01.10	Perikanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perikanan.
01.11	Badan Usaha Milik Negara	Kegiatan pelayanan dalam pengelolaan badan usaha milik negara.
01.12	Investasi	Kegiatan pelayanan dalam pembinaan penanaman modal.
01.13	Koperasi	Kegiatan pelayanan dalam pembinaan koperasi.
01.14	Usaha Kecil dan Menengah	Kegiatan pelayanan dalam pembinaan usaha kecil dan menengah.
01.15	Pariwisata	Kegiatan pelayanan dalam bidang kepariwisataan.
01.16	Perizinan dan Akreditasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait perizinan dan akreditasi.
01.17	Pekerjaan Umum	Kegiatan pelayanan dalam bidang pekerjaan termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum.
01.18	Transmigrasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transmigrasi.
01.19	Transportasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transportasi.
01.20	Perumahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perumahan,
01.21	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
01.22	Pertanahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanahan.

<b>Kode</b>	<b>Referensi Arsitektur</b>	<b>Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE</b>
01.23	Kependudukan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kependudukan.
01.24	Pemerintahan daerah	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara umum.
01.25	Kesehatan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kesehatan.
01.26	Sosial	Kegiatan pelayanan dalam bidang sosial.
01.27	Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
01.28	Hukum	Kegiatan pelayanan dalam bidang hukum.
01.29	Keamanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keamanan.
01.30	Hak Asasi Manusia	Kegiatan pelayanan dalam bidang hak asasi manusia.
01.31	Pendidikan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pendidikan.
01.32	Ketenagakerjaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan.
01.33	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kegiatan pelayanan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
01.34	Pemuda	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
01.35	Olahraga	Kegiatan pelayanan dalam bidang keolahragaan.
01.36	Pertambangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertambangan.
01.37	Energi	Kegiatan pelayanan dalam bidang energi.
01.38	Kehutanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kehutanan.
01.39	Kelautan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kelautan.
01.40	Lingkungan Hidup	Kegiatan pelayanan dalam bidang lingkungan hidup
01.41	Agama	Kegiatan pelayanan dalam bidang agama.
01.42	Kebudayaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kebudayaan.
01.43	Informasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang informasi.
01.44	Komunikasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang komunikasi.
<b>Layanan Administrasi Pemerintahan (02)</b>		
02.01	Dalam Negeri	Kegiatan pelayanan bidang dalam negeri.
02.02	Keuangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keuangan negara.

<b>Kode</b>	<b>Referensi Arsitektur</b>	<b>Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE</b>
02.03	Perencanaan Pembangunan Nasional	Kegiatan pelayanan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional.
02.04	Aparatur Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan aparatur negara.
02.05	Kesekretariatan Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang sekretariatan negara.
02.06	Dukungan Operasional Organisasi	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang mendukung operasional organisasi/instansi.
02.07	Akuntabilitas Kinerja	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait akuntabilitas kinerja.
02.08	Organisasi dan Tata Kelola	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kelembagaan dan tata kelola kelembagaan.
02.09	Data dan Informasi Pemerintahan	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pengelolaan data dan informasi pemerintahan.

#### **4.2. Identifikasi Atribut Metadata Arsitektur Layanan SPBE**

Didalam penyusunan Domain Arsitektur Layanan SPBE, pengisian metadata berlandaskan SE Menpan-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 4.2. 1 Atribut Metadata Arsitektur Layanan

<b>No.</b>	<b>Nama Atribut</b>	<b>Keterangan</b>
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Layanan	Merupakan nama dari layanan yang dihasilkan oleh unit kerja/perangkat daerah.
3	Tujuan Layanan	Merupakan penjelasan tujuan dari layanan
4	Fungsi Layanan	Merupakan uraian penjelasan dari fungsi-fungsi yang terdapat dalam layanan
5	Model Referensi Layanan	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama layanan yang dipilih
6	Unit Pelaksana	Merupakan unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan layanan



No.	Nama Atribut	Keterangan
7	Kementerian/ Lembaga terkait	Merupakan kementerian/lembaga terkait dengan layanan
8	Urusan Pemerintahan Terkait	Merupakan urusan pemerintahan yang terkait dengan layanan
9	Target Layanan	Merupakan target pengguna layanan
10	Metode Layanan	Merupakan model dari layanan
11	Potensi manfaat	Merupakan manfaat yang diperoleh dalam penerapan layanan SPBE baik untuk kebutuhan internal instansi pusat dan pemerintah daerah, serta kepentingan eksternal, para pemangku kepentingan, hingga nasional (a.l.: meningkatkan kualitas layanan pemerintah, mempercepat proses pemberian layanan, peningkatan akurasi dan kualitas data, meningkatkan efisiensi operasional dll).
12	Potensi ekonomi	Merupakan kuantifikasi potensi manfaat yang diperoleh dalam penerapan layanan SPBE
13	Potensi risiko	Merupakan potensi risiko yang akan terjadi dalam penerapan layanan SPBE
14	Mitigasi risiko	Merupakan mitigasi penanganan potensi risiko yang dihadapi dalam penerapan layanan SPBE
15	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

#### 4.3. Identifikasi Domain Layanan SPBE Tiap Perangkat Daerah

Untuk memberikan gambaran yang jelas terkait Layanan SPBE di Pemerintah Kota Singkawang, terdapat 405 layanan yang diselenggarakan. Dari jumlah tersebut, hanya 268 layanan yang berhasil dipetakan hingga RAL Level 3 dan Level 4 didalam penyusunan Domain Layanan SPBE pada SIA SPBE V2. Saat ini, terdapat 137 layanan yang belum dapat dipetakan hingga Level 3 karena RAL Level 2 pada SIA SPBE V2 masih belum tersedia, sehingga pada daftar layanan tidak bisa untuk diberi ID. RAL Level 2 yang belum dapat dipetakan adalah sebagai berikut :

- RAL.01.16 PERIZINAN DAN AKREDITASI
- RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN
- RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA
- RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI

Berikut ini merupakan daftar layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Singkawang ;

Tabel 4.3. 1 Daftar Layanan Pemerintah Kota Singkawang

No	ID	Nama Layanan
1.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.03.01.01	Layanan Perencanaan
2.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.06.01	Layanan Penganggaran
3.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.06.02	Layanan Keuangan
4.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.02.11.01	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
5.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.01	Layanan Kepegawaian
6.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.06.01	Layanan Kearsipan Dinamis
7.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.02.11.02	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
8.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.04.01	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah
9.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.04.02	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
10.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.02	Layanan Kinerja Pegawai
11.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.05.01	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
12.		Layanan Data Terbuka
13.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.28.01.01	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
14.		Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / PBG
15.		Izin Lokasi
16.		Izin Membuka Lahan
17.		Izin Reklame dan Izin Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame
18.		Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
19.		Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah/Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)
20.		Izin Pemakaian/ Penguasaan Air Permukaan (SIPA)
21.		Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
22.		Izin Usaha Industri (IUI) / Tanda Daftar Industri (TDI)
23.		Tanda Daftar Gudang (TDG)
24.		Izin Penyelenggaraan Pameran Dagang (Promosi)
25.		Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
26.		Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
27.		Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)

<b>No</b>	<b>ID</b>	<b>Nama Layanan</b>
28.		Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
29.		Izin Usaha Peternakan (IUP)
30.		Izin Usaha Obat Hewan
31.		Izin Usaha Pemotongan Hewan
32.		Izin Rumah Sakit Hewan
33.		Izin Praktek Kedokteran Hewan
34.		Izin Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
35.		Izin Perluasan Usaha Peternakan
36.		Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
37.		Surat Izin Penangkapan Ikan
38.		Surat Izin Praktik (Dokter Umum, Gigi, Spesialis)
39.		Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
40.		Surat Izin Praktik Mandiri Bidan (SIPMB)
41.		Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) (Sarana dan Praktik Mandiri)
42.		Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ)
43.		Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
44.		Surat Izin Praktik ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPATLM)
45.		Surat Izin Praktik Fisioterafis (SIPF)
46.		Surat Izin Kerja Fisioterafis (SIKF)
47.		Surat Izin Praktik Terafis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
48.		Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
49.		Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
50.		Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)
51.		Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
52.		Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIPRO)
53.		Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama / Utama (Bersalin, Gigi, Kecantikan DLL)
54.		Surat Izin Tukang Gigi (ITG)
55.		Izin Operasional Rumah sakit Tipe C dan D
56.		Surat Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik
57.		Surat Izin Optik
58.		Surat Izin Apotek (SIA)
59.		Surat Izin Toko Obat (SITO)
60.		Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKRM)
61.		Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)
62.		Surat Izin Puskesmas

No	ID	Nama Layanan
63.		Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
64.		Surat Izin Operasional Unit Transfusi Darah (UTD)
65.		Izin Trayek Dalam Kota
66.		Izin Usaha Angkutan Dalam Kota
67.		Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air
68.		Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
69.		Izin Pengumpulan Limbah B3
70.		Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan Oleh Swasta
71.		Izin Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
72.		Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan
73.		Izin Pendirian Sekolah (Satuan Pendidikan)
74.		Izin Pendirian PAUD
75.		Izin Mendirikan Menara Tower Telekomunikasi
76.		Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen
77.		Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus
78.		Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKL/G)
79.		Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator
80.		Izin Galian Kabel Telekomunikasi
81.		Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi
82.		Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi
83.		Izin Warnet
84.		Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
85.		Rekomendasi Promosi Dagang
86.		Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan
87.		Surat Jalan Ternak
88.		Rekomendasi Instalasi
89.		Pelayanan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan

No	ID	Nama Layanan
90.		Pelayanan Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Usaha Perikanan Tangkap
91.		Pelayanan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Air
92.		Sertifikat/Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi
93.		Rekomendasi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
94.		Sanitasi Makan Jajanan
95.		Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
96.		Surat Keterangan Pendaftaran Shen Se
97.		Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT)
98.		Sanitasi Jasa Boga
99.		Kesehatan Hotel
100.		Surat Rekomendasi SIP Dokter Ke - IV
101.		Rekomendasi Penyelenggaraan Radiologi Diagnosa
102.		Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
103.		Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot
104.		Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi
105.		Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
106.		SPPL
107.		UKL - UPL
108.		Rekomendasi Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
109.		Rekomendasi Keramaian Kegiatan PORA
110.		Rekomendasi Keramaian Kegiatan Ekonomi Kreatif
111.		Peminjaman Gedung PIP
112.		Peminjaman Rigging
113.		Peminjaman Soundsystem/ Lighting
114.		Peminjaman Truck
115.		Peminjaman Kursi
116.		Rekomendasi Pembukaan Kantor Cabang
117.		Rekomendasi Pembuatan Paspor Calon Tenaga Kerja
118.		Penerbitan dan Perpanjangan Kartu Pencari Kerja (AK.1)
119.		Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
120.		Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA)



<b>No</b>	<b>ID</b>	<b>Nama Layanan</b>
121.		Penerbitan Rekomendasi Penelitian
122.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.01	Pencatatan Biodata Penduduk
123.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.02	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
124.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.03	Penerbitan Kartu Keluarga
125.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.04	Penerbitan Kartu Identitas Anak
126.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.05	Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang WNI dan WNA
127.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.06	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi
128.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.07	Pelayanan Legalisasi Dokumen Kependudukan
129.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.08	Pencatatan Kelahiran
130.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.09	Pencatatan Lahir Mati
131.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.10	Pencatatan Kematian
132.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.11	Pencatatan Perkawinan Disdukcapil
133.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.12	Pencatatan Pembatalan Perkawinan
134.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.13	Pencatatan Perceraian
135.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.14	Pencatatan Pembatalan Perceraian
136.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.15	Pencatatan Pengangkatan Anak
137.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.16	Pencatatan Pengakuan Anak
138.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.17	Pencatatan Pengesahan Anak
139.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.18	Pencatatan Perubahan Nama
140.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.19	Pencatatan Pembetulan Akta
141.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.20	Pencatatan Pembatalan Akta
142.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.21	Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
143.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.22	Pencatatan Perubahan Status Pewarganegaraan
144.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.23	Pelayanan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan

No	ID	Nama Layanan
145.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.24	Pelayanan Perjanjian Kerjasama
146.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.19.02.01	Penerbitan Izin Trayek tentang penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
147.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.42.05.01	Layanan Sirkulasi
148.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.42.05.02	Layanan Keanggotaan
149.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.42.05.03	Layanan Baca Anak
150.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.42.05.04	Layanan Baca Umum I dan II
151.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.40.03.01	Surat Persetujuan Teknis Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah dan Pembuangan Emisi
152.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.40.03.02	Surat Kelayakan Operasional (SLO) Instalasi Pengolahan Air Limbah / Fasilitas Injeksi dan Alat Pengendali Emisi
153.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.40.02.01	Penerbitan Persetujuan Lingkungan berupa Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) bagi usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL yang tidak masuk dalam sistem OSS
154.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.40.02.02	Rekomendasi Persetujuan/Penolakan UKL-UPL untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL yang Tidak Masuk dalam Sistem OSS
155.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.40.02.03	Verifikasi SPPL yang tidak Masuk dalam Sistem OSS
156.		Standar Pelayanan Konsultasi Bagian Pemerintah
157.		Standar Pelayanan Data/Laporan/Informasi Bagian Pemerintahan
158.		Standar Pelayanan Konsultasi Bagian Kesejahteraan Rakyat
159.		Standar Pelayanan Data/Laporan/Informasi Bagian Kesejahteraan Rakyat
160.		Standar Pelayanan Konsultasi Hibah dan Bantuan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat
161.		Standar Pelayanan Konsultasi Bagian Hukum
162.		Standar Pelayanan Data/Laporan/Informasi Bagian Hukum

No	ID	Nama Layanan
163.		Standar Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah
164.		Standar Pelayanan Penanganan Perkara secara Litigasi dan Non Litigasi
165.		Standar Pelayanan Konsultasi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
166.		Standar Pelayanan Data/Laporan/Informasi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
167.		Standar Pelayanan Konsultasi Bagian Administrasi Pembangunan
168.		Standar Pelayanan Data/Laporan/Informasi Bagian Administrasi Pembangunan
169.		Standar Pelayanan Konsultasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
170.		Standar Pelayanan Data/Laporan/Informasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
171.		Standar Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
172.		Standar Pelayanan Pengelolaan User ID Pelaku Pengadaan di LPSE
173.		Standar Pelayanan Konsultasi Bagian Umum
174.		Standar Pelayanan Data/Laporan/Informasi Bagian Umum
175.		Standar Pelayanan Surat Keluar Bagian Umum
176.		Standar Pelayanan Surat Tugas Bagian Umum
177.		Standar Pelayanan Fasilitasi Tamu Pimpinan Bagian Umum
178.		Standar Pelayanan Konsultasi Bagian Organisasi
179.		Standar Pelayanan Data/Laporan/Informasi Bagian Organisasi
180.		Standar Pelayanan Konsultasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
181.		Standar Pelayanan Data/Laporan/Informasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
182.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.05.02	Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat
183.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.02.04.01	Pelayanan Klinik Dana BOS

<b>No</b>	<b>ID</b>	<b>Nama Layanan</b>
184.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.02.11.03	Pelayanan Klinik Konsultasi Pengadaaan Barang/Jasa
185.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.01.01	Pelayanan Atas Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat
186.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.01.02	Pelaksanaan Reses
187.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.01	Pelayanan Pendaftaran Rumah Sakit
188.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.02	Pelayanan Surat Keterangan Dokter dan Medis
189.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.03	Pelayanan Surat Keterangan Visum
190.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.03	Pengelolaan Manajemen dan Administrasi Kepegawaian Rumah Sakit
191.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.02.08.01	Pengelolaan Administrasi Keuangan RSUD
192.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.02.11.04	Pengelolaan Barang dan Asset RSUD
193.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.04	Pelayanan Gawat Darurat RSUD
194.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.05	Pelayanan Rawat Jalan RSUD
195.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.06	Pelayanan Rawat Inap RSUD
196.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.07	Pelayanan Bedah Sentral
197.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.08	Pelayanan Persalinan RSUD
198.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.09	Pelayanan Rehabilitasi Medik
199.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.10	Pelayanan Hemodialisa (HD)
200.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.11	Pelayanan Intensive Care Unit (ICU)
201.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.12	Pelayanan Neonatal Intensive Care Unit (NICU)
202.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.13	Pelayanan Instalasi Radiologi
203.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.14	Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik
204.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.15	Pelayanan Instalasi Laboratorium Mikrobiologi Klinik
205.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.16	Pelayanan UTDRS
206.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.17	Pelayanan Medical Check Up
207.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.18	Pelayanan Instalasi Farmasi

<b>No</b>	<b>ID</b>	<b>Nama Layanan</b>
208.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.19	Pelayanan Instalasi Pusat Sterilisasi Alat
209.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.20	Pelayanan Instalasi Gizi
210.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.21	Pelayanan Ambulance
211.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.22	Pelayanan Instalasi Sanitasi
212.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.23	Pelayanan IPSRS
213.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.24	Pelayanan Kamar Jenazah
214.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.02.01	Mutasi Siswa PAUD/ TK
215.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.03.01	Program Indonesia Pintar Kesetaraan
216.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.02.02	Legalisir Ijazah PAUD
217.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.03.02	Legalisir Ijazah Pendidikan Non Formal
218.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.02.03	Izin Pendirian Sekolah PAUD/TK
219.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.03.03	Izin Pendirian Sekolah Pendidikan Non Formal
220.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.02.04	Pelayanan Koordinasi dan Konsultasi Urusan Pendidikan Anak Usia Dini
221.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.03.04	Pelayanan Koordinasi dan Konsultasi Urusan Pendidikan Non Formal
222.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.02.05	Program Indonesia Pintar SD/SMP
223.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.02.06	Legalisir Ijazah SD/SMP
224.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.02.07	Mutasi Siswa SD/SMP
225.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.02.08	Izin Pendirian Lembaga SD dan SMP
226.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.02.09	Pengesahan Ijazah/STTB Asli hilang atau rusak yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tutup atau beda domisili
227.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.02.10	Pelayanan Koordinasi dan Konsultasi Urusan siswa dan lembaga Pendidikan SD/SMP
228.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.01.01	Kenaikan Gaji Berkala PTK
229.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.01.02	Pengajuan Entri Data PTK Baru



<b>No</b>	<b>ID</b>	<b>Nama Layanan</b>
230.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.01.03	Izin Cerai PTK
231.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.01.04	Kenaikan Pangkat PTK
232.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.01.05	Mutasi PTK
233.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.01.06	Rekomendasi Surat Izin dan Tugas Belajar
234.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.01.07	Cuti PTK
235.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.01.08	Usulan Penyelesaian Gelar
236.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.01.09	Usulan Pensiun PTK
237.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.01.10	Usulan Jabatan Fungsional PTK
238.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.01.11	Koordinasi dan Konsultasi Urusan PTK
239.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.42.03.01	Membuat Rekomendasi
240.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.42.01.01	Penerbitan Pembuatan Piagam
241.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.42.01.02	Informasi Publik Kebudayaan
242.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.42.01.03	Konsultasi dan Koordinasi tentang Kebudayaan
243.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.04	Standar Pelayanan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
244.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.05	Standar Pelayanan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan
245.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.03.01	Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk Rawat Inap
246.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.02.01	Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Singkawang
247.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.04.01	Perizinan Pengumpulan Uang dan Barang
248.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.04.02	Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang
249.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.04.03	Surat Keterangan Pengumpulan Uang dan Barang
250.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.01.01	Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial
251.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.01.02	Penerbitan Izin Ziarah Taman Makam Pahlawan Bambu Runcing
252.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.04.04	Penerbitan Rekomendasi Bansos bagi Lansia dan Anak
253.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.04.05	Penerbitan Rekomendasi Bansos bagi Penyandang Disabilitas

<b>No</b>	<b>ID</b>	<b>Nama Layanan</b>
254.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.04.06	Rekomendasi Surat Izin Bantuan Hibah kepada Panti
255.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.04.07	Rekomendasi Surat Izin Operasional Panti
256.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.04.08	Rekomendasi Pengangkatan Anak
257.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.04.09	Rekomendasi Surat Izin Bantuan Hibah kepada Organisasi Wanita
258.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.01.03	Penanganan Pengaduan Korban (Tindak Kekerasan) secara langsung dengan intervensi krisis
259.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.01.04	Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Secara Online (SAPA)
260.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.22.01.01	Standar Pelayanan Informasi Peruntukan Tanah/lahan
261.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.22.09.01	Standar Pelayanan Mediasi Penanganan Sengketa Tanah/Lahan
262.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.22.02.01	Standar Pelayanan Pengukuran (Titik Koordinat/Manual)
263.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.22.08.01	Standar Pelayanan Sistem Informasi Pertanahan Terpadu (SIPETA)
264.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.20.04.01	Standar Pelayanan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
265.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.20.04.02	Standar Pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana
266.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.20.04.03	Standar Pelayanan Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah
267.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.09.01.01	Pertimbangan Teknis Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Bibit/Hewan, Unggas, Ruminansia, Non Ruminansia , Hewan Kesayangan)
268.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.09.07.01	Pertimbangan Teknis Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan
269.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.09.01.02	Pertimbangan Teknis Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Kesayangan
270.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.09.12.01	Pertimbangan Teknis Perizinan ( Praktek Dokter Hewan, Pasar Hewan, Usaha Potong Hewan, Usaha Obat Hewan)
271.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.40.03.03	Pengambilan Contoh dan Analisa Sampel Laboratorium
272.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.40.01.01	Izin Penebangan atau Pemangkasan Pohon

<b>No</b>	<b>ID</b>	<b>Nama Layanan</b>
273.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.40.07.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
274.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.40.05.01	Pelayanan Konsultasi Persyaratan Administasi Dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
275.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.40.05.02	Pelayanan Sosialisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
276.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.40.04.01	Pelayanan Persampahan
277.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.19.03.01	Pengelolaan Fasilitas Parkir
278.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.19.02.02	Penerbitan Surat Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas
279.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.19.03.02	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum,Hias Jalan dan Lampu Taman Kota
280.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.19.03.03	Peningkatan Penerangan Jalan Umum
281.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.19.03.04	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
282.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.35.01.01	Peminjaman Lapangan Skateboard
283.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.35.01.02	Peminjaman Lapangan Bantilan
284.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.35.01.03	Peminjaman Lapangan Kridasana
285.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.35.01.04	Peminjaman Lapangan Mess Daerah
286.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.35.01.05	Peminjaman Lapangan Kridamandala
287.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.35.01.06	Peminjaman Gedung PIP
288.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.35.01.07	Peminjaman Tempat Panjat Tebing
289.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.35.01.08	Peminjaman Kursi
290.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.35.01.09	Peminjaman Aula
291.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.15.05.01	Rekomendasi Kegiatan Cap Go Meh
292.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.15.05.02	Rekomemdsasi Kegiatan Ritual Adat Ngabayot
293.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.15.05.03	Rekomendasi Kegiatan Ramadhan Fair
294.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.15.05.04	Rekomendasi Kegiatan Ritual Adat Naik Dango

<b>No</b>	<b>ID</b>	<b>Nama Layanan</b>
295.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.15.05.05	Rekomendasi Kegiatan Perayaan Christmas Day
296.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.05.07.01	Rekomendasi Kegiatan Event Ekonomi Kreatif
297.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.35.02.01	Rekomendasi dana Hibah di Bidang Olahraga
298.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.35.02.02	Rekomendasi Kegiatan Keolahragaan dan Kepemudaan
299.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.42.05.05	Layanan Referensi
300.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.42.06.01	Layanan magang dan kursus perpustakaan
301.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.42.06.02	Layanan Konsultasi
302.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.42.05.06	Layanan Perpustakaan Keliling
303.		Layanan Peminjaman Arsip
304.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.29.01.01	Pelayanan Pengaduan Masyarakat atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum
305.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.06.03	Pelayanan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
306.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.06.04	Pelayanan Administrasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
307.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.06.05	Pelayanan Administrasi Pajak Hotel
308.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.06.06	Pelayanan Admstrasi Pajak Restoran
309.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.06.07	Pelayanan Administrasi Pajak Hiburan
310.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.06.08	Pelayanan Administrasi Pajak Penerangan Jalan
311.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.06.09	Pelayanan Administrasi Pajak Reklame
312.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.06.10	Pelayanan Administrasi Pajak Sarang Burung Walet
313.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.06.11	Pelayanan Administrasi Pajak Parkir
314.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.06.12	Pelayanan Administrasi Air Tanah
315.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.06.13	Pelayanan Administrasi Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
316.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.06	Standar Pelayanan Mutasi Wilayah
317.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.07	Standar Pelayanan Pemberian Masa Persiapan Pensiun (MPP)

<b>No</b>	<b>ID</b>	<b>Nama Layanan</b>
318.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.08	Standar Pelayanan Pensiun
319.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.09	Standar Pelayanan Identitas ASN (Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen)
320.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.10	Standar Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala
321.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.11	Standar Pelayanan Verifikasi Kenaikan Gaji Berkala
322.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.12	Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat
323.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.13	Standar Pelayanan Peningkatan Pendidikan
324.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.14	Standar Pelayanan Peninjauan dan Perbaikan Masa Kerja
325.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.15	Standar Pelayanan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)
326.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.16	Standar Pelayanan Cuti
327.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.17	Standar Pelayanan Ijin Perceraian
328.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.18	Standar Pelayanan Satya Lencana Karya Satya
329.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.19	Standar Pelayanan Fasilitasi Pembuatan Akun User e-LHKPN
330.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.20	Standar Pelayanan Instalasi Aplikasi Absensi Elektronik
331.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.21	Standar Pelayanan Penetapan Kinerja Pegawai
332.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.22	Standar Pelayanan Pelaporan Kinerja PNS
333.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.23	Standar Pelayanan Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)
334.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.24	Standar Pelayanan Pengusulan Pengangkatan, Pemberhentian dan Kenaikan Jabatan Fungsional
335.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.25	Standar Pelayanan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt)
336.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.26	Standar Pelayanan Tugas Belajar
337.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.27	Standar Pelayanan Ijin Belajar
338.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.28	Standar Pelayanan Rekomendasi Seleksi Melanjutkan Pendidikan
339.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.29	Standar Pelayanan Diklat Teknis Fungsional



No	ID	Nama Layanan
340.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.30	Standar Pelayanan Sertifikasi Kompetensi
341.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.01.05	Pelayanan Pengaduan yang melalui Media surat, Media Handphone, Media Internet dan Media langsung/Tatap Muka
342.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.06.01	Prevensi/Pencegahan, Mitigation, Preparedness/ Kesiapsiagaan
343.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.06.02	Kegiatan Search and Rescue(SAR)
344.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.06.03	Bantuan Darurat dan Pengungsian
345.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.06.04	Layanan Penanganan Bencana Berupa Perahu Boat/ Water Rescue, Peralatan Vertical Rescue, Pompa Air/Alcon,
346.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.06.05	Rehabilitasi
347.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.06.06	Rekonstruksi
348.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.03.03.01	Pelayanan Monitoring, Evaluasi Dokumen Perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
349.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.03.03.02	Pelayanan Monitoring, Evaluasi Dokumen Perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam
350.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.03.03.03	Pelayanan Monitoring, Evaluasi Dokumen Perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan
351.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.03.01.02	Pelayanan Asistensi Renstra Perangkat Daerah
352.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.03.01.03	Pelayanan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota
353.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.03.01.04	Pelayanan Data dan Informasi
354.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.33.02.01	Pelayanan Lomba Innovation Government Award (IGA)
355.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.25	Surat Keterangan Waris
356.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.26	Surat Dispensasi Nikah
357.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.04.10	Surat Rekomendasi Bantuan Dana
358.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.03.02	Surat Keterangan Tidak Mampu
359.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.01.07.27	Pencatatan Perkawinan

<b>No</b>	<b>ID</b>	<b>Nama Layanan</b>
360.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.04.11	Rekomendasi Organisasi Sosial
361.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.04.12	Rekomendasi Pengumpulan Uang dan atau Barang untuk Keperluan Sosial Skala Kecamatan
362.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.41.05.01	Rekomendasi Pembangunan/Rehab Rumah Ibadah
363.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.26.03.03	Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu
364.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.31.03.05	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal
365.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.35.02.03	Rekomendasi kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan
366.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.29.02.01	Rekomendasi Izin Keramaian
367.		Penerbitan Surat Keterangan Domisili Parpol, Ormas, LSM dan Orsos
368.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.25	Surat Keterangan Dokter
369.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.26	Surat Keterangan Sakit/ Cuti Hamil
370.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.27	Legalisir administrasi pelayanan kesehatan
371.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.04.03.31	Pengelolaan Manajemen dan Administrasi Kepegawaian Puskesmas
372.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.02.08.02	Pengelolaan Administrasi Keuangan
373.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.02.02.11.05	Pengelolaan Barang dan Asset
374.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.28	Pelayanan Pemeriksaan Umum
375.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.29	Pelayanan Tindakan Gawat Darurat
376.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.30	Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut
377.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.31	Pelayanan Kesehatan Keluarga bersifat UKP
378.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.32	Pelayanan Gizi bersifat UKP
379.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.33	Pelayanan Kesehatan Anak
380.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.34	Pelayanan KB
381.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.35	Pelayanan Kesehatan Remaja
382.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.36	Pelayanan konseling kesehatan

<b>No</b>	<b>ID</b>	<b>Nama Layanan</b>
383.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.37	Pelayanan IMS & HIV
384.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.38	Pelayanan TB Paru
385.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.39	Pelayanan Imunisasi dan Vaksinasi
386.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.40	Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Infeksius
387.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.06.01	Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
388.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.41	Pelayanan Pendaftaran
389.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.42	Pelayanan Rawat Jalan
390.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.43	Pelayanan Laboratorium
391.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.02.01	Pelayanan Apotik
392.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.44	Pelayanan Surat Keterangan Sehat
393.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.45	Pelayanan Gawat Darurat
394.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.46	Pelayanan Rawat Inap
395.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.04.47	Pelayanan Persalinan
396.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.06.02	Pelayanan Promosi Kesehatan
397.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.06.03	Pelayanan Kesehatan Keluarga
398.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.06.04	Pelayanan Gizi Masyarakat
399.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.06.05	Pelayanan Kesehatan Lingkungan
400.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.05.01	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
401.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.25.06.06	Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat
402.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.09.04.01	Vaksinasi Hewan/Ternak
403.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.09.05.01	Pelayanan Kesehatan Hewan
404.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.09.08.01	Pemotongan Sapi
405.	PEMKOTSINGKAWANG-DAL.01.09.08.02	Pemotongan Babi

## BAB V

### ARSITEKTUR APLIKASI SPBE

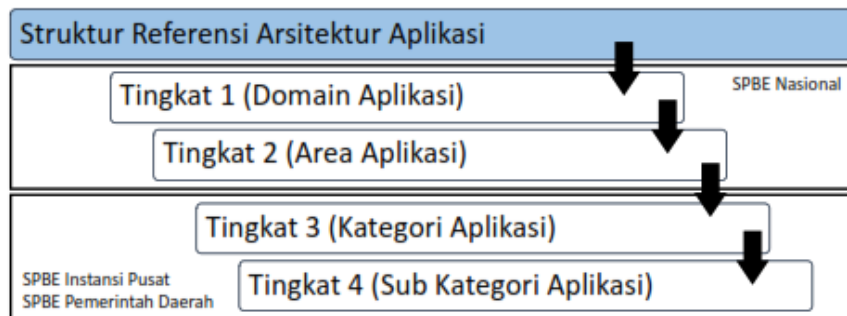
#### 5.1. Identifikasi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Referensi arsitektur aplikasi SPBE atau yang disingkat RAA berlandaskan Arsitektur SPBE Nasional yang diklasifikasikan kedalam 4 tingkatan yaitu :

- a. domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. area aplikasi, yang menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. kategori aplikasi, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
- d. sub kategori aplikasi, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Pemerintah Daerah akan mendefinisikan tingkatan 3 (tiga) dan tingkatan 4 (empat). Proses klasifikasi dan identifikasi RAA pada struktur domain di tingkat nasional menjadi pedoman untuk pembentukan Arsitektur SPBE di pemerintah daerah.

Gambar 5.1. 1 Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE



RAA SPBE Nasional terdiri dari 2 domain aplikasi pada tingkat 1 (satu) dan 4 area aplikasi pada tingkat 2 (dua). Dalam penyusunan domain arsitektur aplikasi SPBE, Pemerintah Kota Singakawang mengacu pada RAA SPBE Nasional dan melengkapinya dengan data pada tingkat yang lebih rinci pada tingkat 3 (tiga). Berikut ini adalah RAA yang disusun berdasarkan struktur tersebut.

Tabel 5.1. 1 Taksonomi Arsitektur Aplikasi SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE
Aplikasi Umum (01)		
01.01	Aplikasi Layanan Publik	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE
		pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan publik.
01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung administrasi pemerintahan.
Aplikasi Khusus (02)		
02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, untuk mendukung misi tertentu, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi
02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.

## 5.2. Identifikasi Atribut Metadata Arsitektur Aplikasi SPBE

Didalam penyusunan Domain Arsitektur Aplikasi SPBE, pengisian metadata berlandaskan SE Menpan-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Tujuan metadata arsitektur aplikasi SPBE tersebut akan membantu mengidentifikasi peluang, seperti duplikasi atau redundansi, serta peluang untuk berbagi pakai atau penggunaan kembali.

Tabel 5.2. 1 Atribut Metadata Aplikasi SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2.	Nama Aplikasi	Nama aplikasi yang digunakan atau dimiliki
3.	Uraian Aplikasi	Berisi uraian atau deskripsi secara umum dari aplikasi.
4.	Fungsi Aplikasi	Berisi keterangan fungsi dari aplikasi terhadap layanan yang didukung.
5.	Kode Model Referensi SPBE	Kode model referensi yang terkait dengan aplikasi

No.	Nama Atribut	Keterangan
6.	Layanan yang Didukung	Layanan yang didukung oleh aplikasi, pilihan layanan yang didukung didapat dari metadata layanan.
7.	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data.
8.	Luaran	Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki atau digunakan.
9.	Inputan Data	Merupakan identifikasi terhadap data yang dibutuhkan (diinput)
10.	Supplier Data	Merupakan identifikasi terhadap nama penghasil data
11.	Luaran Data	Merupakan identifikasi terhadap data yang dihasilkan
12.	Customer Data	Merupakan identifikasi terhadap pengguna data
13.	Basis Aplikasi	Basis dari aplikasi (Desktop; Web; Cloud; atau Mobile)
14.	Server Aplikasi	Server yang digunakan oleh aplikasi, pilihan server yang digunakan didapat dari metadata perangkat keras server.
15.	Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman	Tipe lisensi dari aplikasi (Open Source/Proprietary)
16.	Bahasa Pemrograman	Bahasa pemrograman yang digunakan oleh aplikasi.
17.	Kerangka Pengembangan	Kerangka atau Framework yang digunakan oleh aplikasi.
18.	Basis Data	Basis data yang digunakan oleh aplikasi.
19.	Unit Pengembang	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi
20.	Unit Operasional Teknologi	Unit yang melakukan operasional teknologi layanan
21.	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

### 5.3. Identifikasi Domain Aplikasi SPBE

Untuk memberikan gambaran yang jelas terkait aplikasi SPBE yang ada di Pemerintah Kota Singkawang, terdapat 76 aplikasi khusus fungsi tertentu yang telah dipetakan dan digunakan didalam pelayanan publik maupun pelayanan administrasi pemerintahan.

Tabel 5.3. 1 Daftar Aplikasi SPBE

No	ID	Nama Aplikasi	Fungsi
1.	PEMKOT SINGKAWANG-	Sistem Informasi Pelaporan Pelayanan	Memudahkan warga atau pengguna layanan untuk dengan mudah melaporkan permasalahan,



No	ID	Nama Aplikasi	Fungsi
	RAA.02.0 2.01	Publik (SILAP YANLIK)	memberikan umpan balik, atau mengajukan permintaan layanan melalui website
2.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.02	Sistem Informasi Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (SISI PERILAKU)	Pendaftaran dan verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Kelurahan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
3.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.03	Sistem Informasi Manajemen Administrasi Rumah Tangga ASN (SMART ASN)	Memudahkan administrasi ASN di lingkungan BKPSDM Kota Singkawang
4.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.04	Sistem Informasi Keolahragaan (SIOLGA)	Pendataan atlit dan wasit di Kota Singkawang
5.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.05	Sistem Informasi Asistensi Verifikasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (SIASVRI)	Memudahkan perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan yang sinkron dan selaras, memudahkan proses asistensi dan verifikasi untuk penyalarasan dokumen perencanaan yang disusun. Menjadikan proses asistensi dan verifikasi menjadi lebih efektif dan efisien
6.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.06	Sistem Informasi Pasar, Tera/Tera Ulang (SIRIP ELANG)	Monitoring retribusi pasar, tera/tera ulang, serta berfungsi untuk pengelolaan PAD
7.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.07	Harga Pangan	Menampilkan harga realtime yang berlaku pada hari tersebut, bahan titik survei harga pokok sebagai indikator inflasi daerah dan nasional
8.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.08	Kesbangpol Kinerja Efektif, Semangat, Kembangkan Potensi Disiplin Terarah (KESBANGPOL LINCAH)	Monitoring kinerja ASN dilingkungan Kesbangpol Kota Singkawang
9.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.09	Sistem Informasi Standar Belanja (SIRAJA)	Memudahkan dalam memformulasikan analisa standar harga
10.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.10	Sistem Informasi Manajemen Peta Pajak Daerah (SIMATA ARAH)	Merupakan GIS berbasis Web yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan dan menampilkan data informasi yang menunjukkan suatu lokasi objek tertentu dengan menggunakan jaringan internet.

No	ID	Nama Aplikasi	Fungsi
			Dalam bidang Pajak Daerah simata arah sangat diperlukan untuk memudahkan BAPENDA atupun instansi terkait lainnya untuk melakukan manajemen data spasial perpajakan, serta memudahkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan
11.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.0 2.11	Sistem Informasi Data Terpadu Usaha Mikro (SIDATUM)	Pendataan usaha mikro di Kota Singkawang, sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan, monitoring aktivitas pelaku usaha mikro
12.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.0 2.12	Sistem Informasi Jalan Jembatan (SIJANTAN)	Layanan Pengaduan Masyarakat dan Database Jalan dan Jembatan Kota Singkawang
13.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.0 2.13	Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	Sarana pendokumentasian dan informasi produk hukum. Meningkatkan pengetahuan hukum, memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya.
14.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.0 2.14	Kamus Pembangunan Pokok Pokok-Pikiran (KANG KOPI)	Mendorong tercapainya tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Kota Singkawang, Proses penyusunan RKPD menjadi lebih cepat dan terarah, memudahkan anggota DPRD mengetahui prioritas pembangunan, memudahkan OPD memonitor dan memverifikasi usulan pikir DPRD, mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran
15.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.0 2.15	Lowongan Kerja Online Terintegrasi (LOKER KITE)	Menghubungkan perusahaan dan pencari kerja melalui bursa siap kerja, pelatihan dan memfasilitasi pelayanan pembuatan kartu kuning, menyediakan informasi lowongan kerja, menampilkan perusahaan populer di kota singkawang yang menyediakan lowongan kerja
16.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.0 2.16	Dukcapil Online	Menjembatani masyarakat yang ingin melakukan pelayanan administrasi kependudukan di luar kantor Disdukcapil.
17.	PEMKOT SINGKAWANG-	Sistem Informasi Pengawasan Intern Terpadu (SIPANDU)	Pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan

No	ID	Nama Aplikasi	Fungsi
	RAA.02.0 2.17		
18.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.18	Integrated Library System (INLIS)	Memudahkan pembaca mencari buku mencari koleksi perpustakaan daerah
19.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.19	Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM PKB)	Database kendaraan bermotor yang uji di Kota Singkawang
20.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.20	Sistem Informasi Rumah Sakit (SIM RS)	Administrasi pasien rawat jalan dan rawat inap, elektronik rekam medis, inventaris barang non- medis dan penunjang. Olah data billing dan tagihan pasien dan terintegrasi dengan BPJS
21.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.21	Sistem Informasi Pelaporan Online Rumah Sakit (SILAPOR)	Manajemen alat kesehatan penunjang medis pada RSUD
22.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.22	Tempat Curhatan Masyarakat (TAHAN SAKAT)	Mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik
23.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.23	Geographic Information System Komunikasi dan Informatika	Monitoring Menara Telekomunikasi, Wifi dan Jaringan Intra
24.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.24	Sistem Manajemen Aset Daerah (SMAD)	Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah di lingkungan pemerintah Kota Singkawang
25.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.25	Firehotspot	Berfungsi sebagai deteksi dini dan pengendalian potensi kebakaran hutan dan lahan. Aplikasi ini membantu pihak berwenang dan tim penanggulangan bencana dalam mengambil langkah-langkah preventif dan responsif guna melindungi ekosistem dan mencegah kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran.
26.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.26	Back End Firehotspot	Memberikan informasi titik koordinat kepada stakeholder
27.	PEMKOT SINGKAW	Indeks Standar Polusi Udara (ISPU)	Memberikan informasi titik polusi udara

No	ID	Nama Aplikasi	Fungsi
	ANG- RAA.02.0 2.27		
28.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.28	Sistem Informasi Pohon, TPS TPA (SIPPOHON)	Memberikan informasi Pohon Hijauan, TPS, TPA dan Bank Sampah di Kota Singkawang
29.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.29	Quick Information System (QIS)	Menghimpun pemesanan layanan pengambilan sampel dan pengujian sampel di laboratorium.
30.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.30	E-BPHTB	Memudahkan dalam pendataan bea perolahan hak atas tanah dan bangunan dari segi subjek dan objek serta perolahan objek pajak
31.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.31	Surat Perintah Pencairan Dana Online (SP2D Online)	Berfungsi sebagai suatu bank data informasi pencairan dana berdasarkan kategori dan data otentik scan melalui SP2D Online. Data akan bisa disajikan secara lebih akurat dan realtime, sesuai dengan SP2D yang dikeluarkan oleh KPPn pusat, provinsi, kota, kabupaten dll. Mengurangi terjadinya risiko keuangan karena adanya backlog selama proses pencairan dana berlangsung. mempermudah proses penggantian dana dan juga pertanggungjawaban pada pihak pemberi pinjaman
32.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.32	Whistle Blowing System (WBS)	Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pelanggaran di lingkungan pemerintah kota singkawang.
33.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.33	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
34.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.34	Email Singkawang Kota (WEB MAIL)	Aplikasi email pemerintah memiliki beberapa fungsi utama, termasuk pengiriman dan penerimaan email yang aman antara pejabat pemerintah, enkripsi pesan, manajemen jadwal, penanganan spam dan malware, serta penyimpanan arsip email untuk mematuhi regulasi pemerintah. Aplikasi ini mendukung komunikasi yang efisien,

No	ID	Nama Aplikasi	Fungsi
			transparansi, dan kepatuhan dalam lingkungan pemerintahan
35.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.0 2.35	Portal Singkawang Kota	Fungsi Portal Singkawang Kota sebagai public agencies yang menyediakan dan berbagi informasi dengan lembaga-lembaga publik dan partisipasi aktifnya untuk pelaksanaan alur kerja tugas lintas organisasi yang kompleks.
36.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.0 2.36	Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPADAH)	Sipadah merupakan sistem informasi pajak daerah yang terintegrasi. Memberikan kemudahan dalam memberikan layanan secara daring (online) kepada masyarakat atau Wajib Pajak Daerah yang berbasis web service dan android
37.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.0 2.37	TTE Production dan Development	Pembuatan tanda tangan digital yang sah secara hukum, mengelola tanda tangan tersebut, mengintegrasikannya dengan dokumen elektronik, dan memastikan keamanan serta keaslian tanda tangan dan dokumen
38.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.0 2.38	Agenda Pimpinan 126 (AGEN 126)	Memudahkan keprotokolan, dokumentasi, publikasi dan penjadwalan kegiatan pimpinan
39.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.0 2.39	Sistem Informasi Pertanahan Terpadu (SIPETA)	Dapat menunjang kegiatan kerja dan mempermudah penyelesaian tugas-tugas di bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, selain itu menghasilkan informasi, tertib administrasi, keterbukaan, jangkauan pelayanan dan interaksi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dalam pelaksanaan tugas kedinasan
40.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.0 2.40	Absensi Elektronik (e-ABSENSI)	Memudahkan pencatatan kehadiran ASN dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang
41.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.0 2.41	Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SIPRAJA)	Memudahkan proses reviu dan pengarsipan dokumen usulan tender
42.	PEMKOT SINGKAWANG-	Visitor Management System (VMS)	Dokumentasi penjadwalan pelayanan pada tamu bagian PBJ

No	ID	Nama Aplikasi	Fungsi
	RAA.02.0 2.42		
43.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.43	Singkawang Hebat (SIHEBAT)	Aplikasi "Singkawang Hebat" (SIHEBAT) memiliki tujuan untuk memberikan akses cepat dan praktis bagi masyarakat Singkawang untuk mendapatkan informasi terkini, melaporkan masalah, menemukan tempat-tempat menarik, dan lebih banyak lagi. Dengan demikian, aplikasi ini mendukung upaya smart branding dan pemberian layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
44.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.44	Sistem Informasi Pengendalian Penataan Ruang (SIPETARUNG)	Laporan Pengaduan Masyarakat
45.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.45	Sistem Informasi Manajemen Hotel (SIM Hotel)	Pendataan jumlah kunjungan dan lama menginap wisatawan di Kota Singkawang
46.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.46	Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi (SAKTI)	Memudahkan pembuatan laporan rekapitulasi realisasi fisik dan keuangan OPD
47.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.47	Market Businessse Center (MBC)	Menampilkan katalog produk UMKM, informasi harga produk, tampilan produk, alamat pelaku usaha serta nomor kontak pelaku usaha
48.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.48	Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTEL)	Database menara telekomunikasi di Kota Singkawang untuk menarik PAD retribusi
49.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.49	Singkawang Tanggap 112 (SIGAP 112)	Menerima pengaduan dari masyarakat Kota Singkawang, Memberikan informasi lokasi kepada petugas darurat, dan memfasilitasi komunikasi darurat dalam situasi krisis
50.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.50	Satu Data Daerah (SATU DATA)	Berfungsi sebagai pusat informasi terpadu yang memungkinkan masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mengakses dan memanfaatkan data dengan lebih efisien dan efektif.
51.	PEMKOT SINGKAW ANG-	Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)	Pendaftaran peserta didik baru untuk TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri



No	ID	Nama Aplikasi	Fungsi
	RAA.02.0 2.51		
52.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.52	Technical Support	Membantu dalam mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara Dinas Kominfo dan OPD dalam mengatasi permasalahan teknis dalam penggunaan aplikasi dan teknologi informatika. Ini juga memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih lancar, efisien, dan produktif.
53.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.53	CCTV Analytic	Aplikasi ini memiliki fungsi utama untuk mengumpulkan informasi tentang jumlah kendaraan yang masuk ke Kota Singkawang. Dengan integrasi dengan Dinas Perhubungan, Polres Singkawang, dan DAR Kantor Gubernur Kalbar, aplikasi ini membantu dalam pengumpulan data lalu lintas yang akurat dan memberikan informasi yang berguna bagi pihak berwenang dan masyarakat
54.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.54	Satu Peta Singkawang (GEO PORTAL)	Memberikan akses cepat dan visual kepada data geografis terkait Singkawang
55.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.55	Singka.link	Untuk meminimalkan panjang alamat suatu web, sehingga menjadi lebih mudah diingat dan dilacak
56.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.56	Esupervisi	Database pekerjaan pengawasan dan fisik Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi
57.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.57	Sistem Informasi Penataan Ruang (SIMTARU)	Database informasi spasial Tata Ruang Kota Singkawang
58.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.58	Sistem Informasi Retribusi (SIRIBET)	Database retribusi persampahan lunas dari AMGP dan daftar tarif retribusi persampahan berdasarkan klasifikasi golongan PDAM
59.	PEMKOT SINGKAW ANG- RAA.02.0 2.59	Antrian Online	Mendistribusikan pendaftaran pelayanan administrasi kependudukan

No	ID	Nama Aplikasi	Fungsi
60.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.0 2.60	iSingkawangHebat	Memudahkan pembaca mencari sinopsis buku,
61.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.0 2.61	Online Public Access Catalog (OPAC)	Memudahkan pembaca mencari buku mencari koleksi perpustakaan daerah
62.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.0 2.62	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Mempermudah penyusunan anggaran, realisasi dan laporan secara efektif
63.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.0 2.63	Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIMPBB)	Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan
64.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.0 2.64	Elektronik Pendapatan Asli Daerah (E-PAD)	e-pad merupakan sistem elektronik pajak daerah antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, air tanah, sarang burung walet, mineral bukan logam, PJU, pajak parkir
65.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.0 2.65	e-Puskesmas	Database pelayanan di Puskesmas dan Bridging ke Aplikasi P-Care BPJS untuk proses klaim
66.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.0 2.66	e-LHP	Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah disusun dan memastikan tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien yang semula dari manual menjadi digital
67.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.0 2.67	Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN (SIP KOMPAS)	Pencatatan Data ASN, Identifikasi Kebutuhan Kompetensi, Rencana Pengembangan Kompetensi, Pelatihan dan Pengembangan, Evaluasi dan Monitoring, Sertifikasi dan Penghargaan, Pengarsipan Data, Laporan dan Analisis
68.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.0 2.68	PASTI KE SINGKAWANG	Memberikan informasi kepada calon wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Singkawang.
69.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.0 2.69	e-LPKP (Laporan Penilaian Kinerja Pegawai)	Membuat laporan kinerja pegawai dan pengajuan cuti, penghitungan TPP, helpdesk pegawai di lingkungan RSUD Abdul Aziz

No	ID	Nama Aplikasi	Fungsi
70.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.02.70	Antrian Online Rumah Sakit	Pengelolaan antrian pasien
71.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.02.71	PACS (Picture Archiving and Communication System)	PACS berfungsi sebagai pembaca rontgen
72.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.02.72	e-Pasien	Memudahkan pasien untuk mendaftar dan pengecekan histori perawatan pasien
73.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.02.73	Cloud	Penyimpanan data
74.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.02.74	Siperkasa (Sistem Informasi Pada Bagian Perekonomian dan SDA Kota Singkawang)	Fungsi utama aplikasi adalah untuk evaluasi kinerja Perumda Air Minum Gunung Poteng Kota Singkawang 1. Aspek Keuangan Penilaian yang mencakup kemampuan PDAM untuk menciptakan laba dan mengefisienkan kegiatan operasionalnya. 2. Aspek Pelayanan Penilaian bertujuan untuk mengukur perspektif pelayanan yang menggambarkan tingkat kemampuan PDAM memenuhi kebutuhan pelanggannya. 3. Aspek Operasional Penilaian kinerja aspek operasional bertujuan untuk mengukur tingkat perspektif operasional. 4. Aspek SDM Penilaian kinerja aspek sumber daya manusia bertujuan untuk mengukur tingkat inovasi dan pembelajaran dalam kaitannya dengan pengelolaan PDAM
75.	PEMKOT SINGKAWANG-RAA.02.02.75	Simerak Menor (Sistem Informasi Media Reklame Untuk Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan)	Penyimpanan data reklame, pengaduan serta monev reklame
76.	PEMKOT SINGKAWANG-	E-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Singkawang)	Menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja,

<b>No</b>	<b>ID</b>	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Fungsi</b>
	RAA.02.0 2.76		dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan

## BAB VI

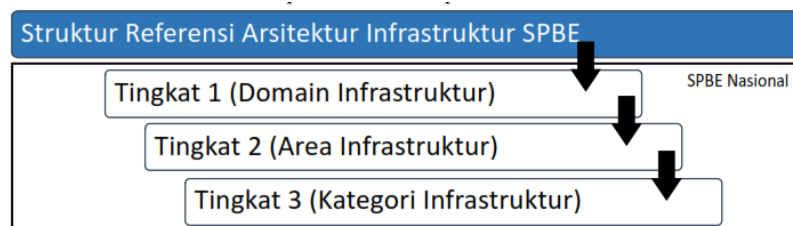
### ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE

#### 6.1. Identifikasi Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Referensi arsitektur infrastruktur SPBE atau yang disingkat RAI berlandaskan Arsitektur SPBE Nasional yang diklasifikasikan kedalam 3 tingkatan yaitu :

- a. domain infrastruktur, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. area infrastruktur, yang menjelaskan area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan aplikasi serta data dan informasi, dikelompokkan ke dalam area infrastruktur sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional; dan
- c. kategori infrastruktur, yang menjelaskan lebih rinci dari area infrastruktur, sebagai tingkat 3 (ketiga), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Gambar 6.1. 1 Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE



RAI SPBE Nasional terdiri dari 3 domain pada tingkat 1 (satu) dan 8 area aplikasi pada tingkat 2 (dua). Dalam penyusunan domain arsitektur Infrastruktur SPBE, Pemerintah Kota Singakawang mengacu pada RAI SPBE Nasional

Tabel 6.1. 1 Taksonomi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE
Fasilitas Komputasi (01)		
01.01	Pusat Data Nasional	Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
01.02	Pusat Komputasi	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu.
01.03	Pusat Kendali	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem.
Sistem Integrasi (02)		
02.01	Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/organisasi.

<b>Kode</b>	<b>Referensi Arsitektur</b>	<b>Deskripsi Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE</b>
02.02	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan.
Platform (03)		
03.01	Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi.
03.02	Komputasi Awan	Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi cloud untuk lingkungan kerja aplikasi.

## 6.2. Identifikasi Atribut Metadata Arsitektur Infrastruktur SPBE

Didalam penyusunan Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE, pengisian metadata berlandaskan SE Menpan-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Terdapat 10 atribut metadata Arsitektur Infrastruktur SPBE yang tersedia antara lain sebagai berikut :

1. Atribut Metadata Fasilitas Komputasi
2. Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah
3. Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
4. Atribut Metadata Komputasi Awan
5. Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform
6. Atribut Metadata Perangkat Keras Server
7. Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan
8. Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan
9. Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan
10. Atribut Metadata Perangkat Keras Periferal

## 6.3. Identifikasi Domain Infrastruktur SPBE

Berdasarkan taksonomi arsitektur infrastruktur SPBE, berikut merupakan ringkasan infstruktur yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang :

- a. Fasilitas Komputasi  
Pada fasilitas komputasi terdapat 2 Pusat Komputasi dan 1 Pusat Data Nasional;
- b. Sistem Integrasi  
Pada sistem integrasi terdapat 1 Jaringan Intra Pemerintah dan 1 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- c. Platform  
Pada platform terdapat 1 Komputasi Awan dan 18 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi



## BAB VII

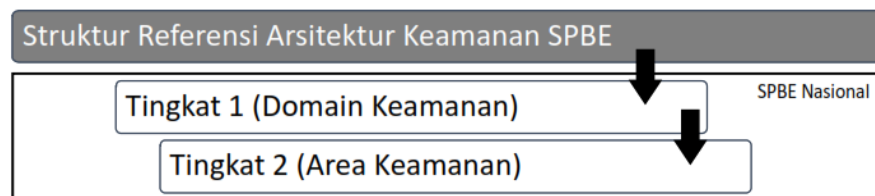
### ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE

#### 7.1. Identifikasi Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Referensi arsitektur infrastruktur SPBE atau yang disingkat RAK berlandaskan Arsitektur SPBE Nasional yang diklasifikasikan kedalam 2 tingkatan yaitu :

- a. domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan rekomendasi kelaikan keamanan, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Gambar 7.1. 1 Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE



RAK SPBE Nasional terdiri dari 3 domain keamanan pada tingkat 1 (satu) dan 10 area keamanan pada tingkat 2 (dua). Dalam penyusunan domain arsitektur keamanan SPBE, Pemerintah Kota Singakawang mengacu pada RAK SPBE Nasional

Tabel 7.1. 1 Taksonomi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE
Standar Keamanan (01)		
01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
01.02	Standar Keamanan	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan keamanan SPBE.
01.03	Regulasi lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya yang dinilai masih relevan selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan keamanan SPBE.
Penerapan Keamanan (02)		
02.01	Edukasi kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.

<b>Kode</b>	<b>Referensi Arsitektur</b>	<b>Deskripsi Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE</b>
02.02	Identifikasi kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.
02.03	Peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keamanan SPBE.
02.04	Penanganan insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi, memulihkan, dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
02.05	Audit Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengukur tingkat kesesuaian penerapan standar keamanan SPBE
<b>Kelaikan Keamanan (03)</b>		
03.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum	Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.
03.02	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

## **7.2. Identifikasi Atribut Metadata Arsitektur Keamanan SPBE**

Didalam penyusunan Domain Arsitektur Keamanan SPBE, pengisian metadata berlandaskan SE Menpan-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Terdapat 7 atribut metadata Arsitektur Keamanan SPBE yang tersedia antara lain sebagai berikut :

1. Atribut Metadata Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
2. Atribut Metadata Edukasi Kesadaran Keamanan
3. Atribut Metadata Kerentanan Keamanan
4. Atribut Metadata Peningkatan Keamanan
5. Atribut Metadata Penanganan Insiden Keamanan
6. Atribut Metadata Audit Keamanan
7. Atribut Metadata Kelaikan Keamanan

### **7.3. Identifikasi Domain Keamanan SPBE**

Berdasarkan taksonomi arsitektur keamanan SPBE, berikut merupakan ringkasan keamanan SPBE yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang :

1. Standar Keamanan

Pada standar keamanan, terdapat 2 Standar Teknis dan Prosedur Keamanan dan 6 Regulasi Lainnya

2. Penerapan Keamanan

Pada penerapan keamanan, terdapat 5 Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE, 1 Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE dan 20 Penanganan Insiden Keamanan SPBE

**BAB VIII**  
**PETA RENCANA SPBE**

**8.1. Analisa Kebutuhan**

Berdasarkan RPDP Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Pemerintah Kota Singkawang mempunyai 18 Sasaran strategis, setiap Sasaran Strategis yang ada, didukung dengan 42 Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis. Tabel berikut merupakan gambaran keterkaitan antara IKU dengan Domain Proses Bisnis :

Tabel 8.1. 1 Keterkaitan IKU dengan Domain Proses Bisnis

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan IKU	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi	Proses Bisnis
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	96,24	96,24	Pengelolaan Tanah Kosong Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Penatagunaan Tanah Pengelolaan Izin Membuka Tanah Penetapan Tanah Ulayat Penyelenggaraan Penataan Ruang Penataan Bangunan dan Lingkungannya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Persen	8,27	8,19	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Dasar Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan IKU	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi	Proses Bisnis
Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Persen	12,93	12,92	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Dasar Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Persen	73,252	72,11	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Risiko Bencana	Persen	120	125	Pengelolaan Penanggulangan Bencana
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan IKU	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi	Proses Bisnis
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM	Pertumbuhan PDRB sektor industri	Persen	4,6	4,58	Pengendalian Izin Usaha Industri Perencanaan dan Pembangunan Industri
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM	Volume usaha koperasi	Rupiah	263.625.219.385	253.625.219.385	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM	Volume usaha UMKM	Rupiah	792.901.050.097	782.901.050.097	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Pengembangan UMKM
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Persen	4,00	3,68	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan IKU	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi	Proses Bisnis
Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,65	1,55	Pengendalian Penduduk Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	Persen	53,25	52,72	Pemenuhan Hak Anak (PHA) Perlindungan Khusus Anak Perlindungan Perempuan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Peningkatan Kualitas Keluarga
Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah	Skor tingkat Capaian Kota Layak Anak	Skor	685	681,55	Pemenuhan Hak Anak (PHA) Perlindungan Khusus Anak Perlindungan Perempuan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Peningkatan Kualitas Keluarga Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif	Persen	26	25	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan IKU	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi	Proses Bisnis
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	PAD sektor pariwisata	Persen	9,8	9,77	Pemasaran Pariwisata Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,67	4,67	Promosi Penanaman Modal Perencanaan Tenaga Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pelayanan Penanaman Modal Penempatan Tenaga Kerja Pengembangan Iklim Penanaman Modal Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Hubungan Industrial

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan IKU	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi	Proses Bisnis
Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,41	68,86	Promosi Penanaman Modal Perencanaan Tenaga Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pelayanan Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Penempatan Tenaga Kerja Pengembangan Iklim Penanaman Modal Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Hubungan Industrial
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Persen	WTP	WTP	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	25	-	Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks SAKIP	Nilai	63,00	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks Inovasi Daerah	Persen	58	-	Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan IKU	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi	Proses Bisnis
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks SPBE	Nilai	3,33	2,6	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Penyelenggaraan Statistik Sektor Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pengelolaan Aplikasi Informatika
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	Nilai	59,73	59,73	Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks Integritas	Nilai	75	73,91	Penyelenggaraan Pengawasan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Persentase Partisipasi Atlet pada PorProv dan Popda	Persen	65	61,71	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	83,15	82,67	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Pengembangan Kesenian Tradisional Pengembangan Kebudayaan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan IKU	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi	Proses Bisnis
Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik	Indeks Toleransi	Nilai	6,6	6,583	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan IKU	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi	Proses Bisnis
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola	Timbulan sampah terkelola	Persen	99	95,98	Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Perencanaan Lingkungan Hidup Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Pengelolaan Persampahan



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan IKU	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi	Proses Bisnis
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	66,11	63,85	Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Perencanaan Lingkungan Hidup Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Pengelolaan Persampahan
Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	49,42	48,71	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan IKU	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi	Proses Bisnis
Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	99,97	97,91	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman
Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Persentase Rumah Tinggal Bersantasi	Persen	93,8	93,5	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	Persen	49,92	64,98	Pengembangan Perumahan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan IKU	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi	Proses Bisnis
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	86	85,04	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Pendaftaran Penduduk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Pengelolaan Profil Kependudukan Pengelolaan Arsip Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pembinaan Perpustakaan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai RB	Nilai	70,01	63,37	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Perekonomian dan Pembangunan
Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	Persentase Genangan/banjir Kota Singkawang	Persen	3,73	4,1	Pengembangan Jasa Konstruksi Pengembangan Permukiman Penataan Bangunan Gedung Penyelenggaraan Jalan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan IKU	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi	Proses Bisnis
Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	Persentase Drainase dalam kondisi baik	Persen	75,45	73,52	Pengembangan Jasa Konstruksi Pengembangan Permukiman Penataan Bangunan Gedung Penyelenggaraan Jalan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	Persentase Jalan mantap	Persen	53,02	52,35	Pengembangan Jasa Konstruksi Pengembangan Permukiman Penataan Bangunan Gedung Penyelenggaraan Jalan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	Persentase Kelancaran Lalu Lintas	Persen	99,41	99,4	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj) Pengelolaan Penerbangan
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang Tertangani	Persen	84	69,14	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Penanganan Bencana Rehabilitasi Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial Pemberdayaan Sosial

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan IKU	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi	Proses Bisnis
Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan	Distribusi PDRB sektor pertanian dan Perikanan	Persen	11,82	11,82	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pengelolaan Perikanan Budidaya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Penyuluhan Pertanian Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Perizinan Usaha Pertanian
Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Skor	86,1	85,7	Pengawasan Keamanan Pangan Penanganan Kerawanan Pangan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

## 8.2. Peta Rencana SPBE

Berikut merupakan penjabaran Peta Rencana SPBE yang berpedoman pada RPDP Kota Singkawang Tahun 2023-2026, memiliki sasaran strategis yang didukung oleh masing-masing indikator tiap perangkat daerah :

Tabel 8.2. 1 Peta Rencana SPBE

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:</b>	<b>Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan</b>			

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target
<b>Indikator</b>	Ketaatan terhadap RTRW	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Realisasi: 96,24	Target: 96,24
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:</b>	<b>Meningkatnya kualitas pendidikan</b>			
<b>Indikator</b>	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Realisasi: 8,19	Target: 8,27
<b>Indikator</b>	Angka Harapan Lama Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Realisasi: 12,92	Target: 12,93
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:</b>	<b>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>			
<b>Indikator</b>	Angka harapan hidup	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Realisasi: 72,11	Target: 73,252
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:</b>	<b>Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum</b>			
<b>Indikator</b>	Indeks Risiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Realisasi: 125	Target: 120
<b>Indikator</b>	Persentase Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Realisasi: 100	Target: 100
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM</b>			
<b>Indikator</b>	Pertumbuhan PDRB sektor industri	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Realisasi: 4,58	Target: 4,6
<b>Indikator</b>	Volume usaha koperasi	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Realisasi: 253.625.219.385	Target: 263.625.219.385



No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target
<b>Indikator</b>	Volume usaha UMKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Realisasi: 782.901.050.097	Target: 792.901.050.097
<b>Indikator</b>	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Realisasi: 3,68	Target: 4,00
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:</b>	<b>Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah</b>			
<b>Indikator</b>	Laju Pertumbuhan Penduduk	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Realisasi: 1,55	Target: 1,65
<b>Indikator</b>	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Realisasi: 52,72	Target: 53,25
<b>Indikator</b>	Skor tingkat Capaian Kota Layak Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Realisasi: 681,55	Target: 685
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif</b>			
<b>Indikator</b>	Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Realisasi: 25	Target: 26
<b>Indikator</b>	PAD sektor pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Realisasi: 9,77	Target: 9,8

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:</b>	<b>Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan</b>			
<b>Indikator</b>	Persentase Penduduk Miskin	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Realisasi: 4,67	Target: 4,67
<b>Indikator</b>	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Realisasi: 68,86	Target: 69,41
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah</b>			
<b>Indikator</b>	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Realisasi: WTP	Target: WTP
<b>Indikator</b>	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Realisasi: -	Target: 25
<b>Indikator</b>	Indeks SAKIP	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Realisasi: -	Target: 63,00
<b>Indikator</b>	Indeks Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Realisasi: -	Target: 58
<b>Indikator</b>	Indeks SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Realisasi: 2,6	Target: 3,33
<b>Indikator</b>	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Realisasi: 59,73	Target: 59,73
<b>Indikator</b>	Indeks Integritas	Inspektorat Daerah	Realisasi: 73,91	Target: 75
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:</b>	<b>Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga</b>			

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target
<b>Indikator</b>	Persentase Partisipasi Atlet pada PorProv dan Popda	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Realisasi: 61,71	Target: 65
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:</b>	<b>Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya</b>			
<b>Indikator</b>	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Realisasi: 82,67	Target: 83,15
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:</b>	<b>Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik</b>			
<b>Indikator</b>	Indeks Toleransi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Realisasi: 6,583	Target: 6,6
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:</b>	<b>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola</b>			
<b>Indikator</b>	Timbulan sampah terkelola	Dinas Lingkungan Hidup	Realisasi: 95,98	Target: 99
<b>Indikator</b>	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Realisasi: 63,85	Target: 66,11
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:</b>	<b>Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar</b>			
<b>Indikator</b>	Persentase penduduk berakses air minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Realisasi: 48,71	Target: 49,42
<b>Indikator</b>	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Realisasi: 97,91	Target: 99,97
<b>Indikator</b>	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Realisasi: 93,5	Target: 93,8

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target
<b>Indikator</b>	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Realisasi: 64,98	Target: 49,92
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>			
<b>Indikator</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sekretariat DPRD. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Seluruh Kecamatan	Realisasi: 85,04	Target: 86
<b>Indikator</b>	Nilai RB	Sekretariat Daerah	Realisasi: 63,37	Target: 70,01
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:</b>	<b>Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi</b>			
<b>Indikator</b>	Persentase Genangan/banjir Kota Singkawang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Realisasi: 4,1	Target: 3,73
<b>Indikator</b>	Persentase Drainase dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Realisasi: 73,52	Target: 75,45
<b>Indikator</b>	Persentase Jalan mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Realisasi: 52,35	Target: 53,02
<b>Indikator</b>	Persentase Kelancaran Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Realisasi: 99,4	Target: 99,41
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:</b>	<b>Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial</b>			
<b>Indikator</b>	Persentase PPKS yang Tertangani	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Realisasi: 69,14	Target: 84

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS:</b>	<b>Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan</b>			
<b>Indikator</b>	Distribusi PDRB sektor pertanian dan Perikanan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan	Realisasi: 11,82	Target: 11,82
<b>Indikator</b>	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan	Realisasi: 85,7	Target: 86,1

**BAB IX**  
**PENUTUP**





Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kota Singkawang mencakup analisis kondisi saat ini terkait arsitektur yang mencakup proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur serta keamanan. Selanjutnya, ditetapkan kondisi ideal dan target pengembangan SPBE Kota Singkawang sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kota Singkawang bukanlah dokumen statis, melainkan dokumen dinamis dan fleksibel. Dokumen ini harus terus dikaji dan diselaraskan seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan dalam organisasi Pemerintah Kota Singkawang. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, tetapi juga sebagai indikator pencapaian penilaian indeks SPBE, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Kota Singkawang dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan Pemerintah Kota Singkawang dapat meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota melalui pemanfaatan teknologi informasi yang optimal.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 11 Juli 2024  
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

  
SUMASTRO

Jabatan	Paraf	Tanggal
Pj. Sekretaris Daerah		
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
Kepala Bagian Hukum		
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika		28/5.2024